



Kementerian PPN/
Bappenas

Pusb̄indiklatren

• M E N U M B U H K A N • K R E D I B E L • B E R K U A L I T A S •

LAPORAN KINERJA (LKJ)

PUSBINDIKLATREN
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

PUSAT
PEMBINAAN,
PENDIDIKAN,
DAN PELATIHAN
PERENCANA

Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional

2021

LAPORAN KINERJA (LKj)

**PUSBINDIKLATREN
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**

2021

PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN PERENCANA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Kata Pengantar

Laporan Kinerja (LKj) merupakan dokumen pertanggungjawaban atas penyelenggaraan organisasi pemerintah. Penyusunan LKj ini mengacu kepada ketentuan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan penilaian kinerja, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan menggunakan indikator kinerja yang tepat, jelas, terukur dan legitimate dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan organisasi pemerintah.

Peraturan yang dimaksud di atas adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintahan, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja, membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang dan berkala kepada atasannya. Peraturan lainnya adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas) menyajikan gambaran capaian pelaksanaan tugas dan fungsi Pusbindiklatren di tahun 2021, analisis perkembangan, kendala dan hambatan, serta usulan peningkatan kinerja Pusbindiklatren di masa datang.

Jakarta, 31 Januari 2022

Kepala Pusbindiklatren
Kementerian PPN/Bappenas



Dr. Guspika, M.B.A.
NIP. 19620818 199003 1 003



Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Pusbindiklatren

Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021

A. Capaian Indikator Kinerja

1. Jumlah Pejabat Fungsional Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Jumlah Pejabat Fungsional Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi pada Perjanjian Kinerja (PK) Kapusbindiklatren 2021 adalah sebanyak 450 orang. Berdasarkan realisasi, Pusbindiklatren berhasil melampaui jumlah target tersebut dengan kelulusan 823 orang pejabat fungsional perencana yang mengikuti uji kompetensi. Meskipun telah melampaui target jumlah dalam PK, Pusbindiklatren akan melakukan upaya peningkatan kelulusan peserta uji kompetensi dengan memberikan bimbingan atau pengayaan kepada peserta yang akan mengikuti uji kompetensi fungsional perencana.

2. Jumlah Karyasiswa yang Lulus Program Pendidikan

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Jumlah Karyasiswa yang Lulus Program Pendidikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kapusbindiklatren 2021 adalah sebanyak 250 orang. Pada tahun 2021, Pusbindiklatren berhasil melampaui target tersebut dengan jumlah kelulusan karyasiswa sebanyak 369 orang karyasiswa, terdiri dari program master sebanyak 362 orang karyasiswa dan 7 orang karyasiswa program doktor. Upaya yang dilakukan oleh Pusbindiklatren dalam mendukung kelulusan karyasiswa dengan mengadakan pemantauan karyasiswa dan melakukan komunikasi secara aktif dengan program studi mengenai perkembangan karyasiswa.

3. Jumlah Peserta Terlatih

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Jumlah Peserta Terlatih pada Perjanjian Kinerja (PK) Kapusbindiklatren 2021 adalah sebanyak 675 orang. Pusbindiklatren berhasil melampaui jumlah yang ditargetkan tersebut dengan menghasilkan 1.952 orang peserta terlatih. Pusbindiklatren akan melakukan upaya peningkatan melalui inovasi penyelenggaraan pelatihan diantaranya dengan pelaksanaan pelatihan nonklasikal dan pelatihan dengan metode *hybrid*.

4. Tingkat kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), serta Jabatan Fungsional Perencana (JFP)

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pada Perjanjian Kinerja (PK) Kapusbindiklatren 2021 adalah puas. Berdasarkan survei kepuasan yang dilakukan Pusbindiklatren pada penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan yang di dalamnya

terdapat juga pelatihan fungsional perencana, Pusbindiklatren berhasil mendapatkan penilaian memenuhi tingkat kepuasan. Pusbindiklatren akan menggunakan hasil survei tersebut untuk perbaikan dalam memberikan pelayanan.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Pusbindiklatren mengelola anggaran sebesar Rp150.318.935.000 yang terdiri atas (1) Rupiah Murni (RM) sebesar Rp35.314.850.000, Lintas DM III dan DM IV sebesar Rp4.824.840.000 dan Lintas Bidang sebesar Rp1.468.236.000; (2) Rupiah Murni Pendamping (RMP) Rp15.895.125.000; serta (3) Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp92.815.884.000 (*loan* PHRD IV Rp74.986.884.000 dan COREMAP-CTI Rp17.829.000.000). Realisasi anggaran Pusbindiklatren pada tahun 2021 sebesar Rp141.408.054.392 atau 94,07 persen dari total anggaran.

C. Rencana Tindak Lanjut ke Depan

Pusbindiklatren melakukan transformasi organisasi dalam rangka penyesuaian terhadap kebijakan reformasi birokrasi. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah susunan organisasi dari strukturalis menjadi fungsionalis. Untuk menjalankan fungsi tersebut, Pusbindiklatren membentuk empat kelompok kerja (Pokja), kelompok ahli, dan kelompok staf strategis. Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2022 oleh tiap-tiap Pokja adalah sebagai berikut.

1. **Pokja 0 (Organisasi, Tata Laksana, Administrasi, dan Keuangan)**
 - a. Penyempurnaan aplikasi *dashboard* Sintesa, Sipena, dan Wifast.
 - b. Pengembangan sistem e-perpustakaan.
 - c. Pembaharuan *website* dan profil Pusbindiklatren.
 - d. Penyempurnaan tata kelola kehumasan Pusbindiklatren.
2. **Pokja 1 (Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Institusi Perencanaan Pembangunan)**
 - a. Pelaksanaan *On The Job Training* bagi SDM perencana sebagai *pilot project* penerapan pelatihan nonklasikal.
 - b. Metode pelaksanaan pelatihan *hybrid* yaitu dengan sistem pembelajaran daring dan luring.
 - c. Pemetaan progres HC DP instansi sasaran program Pusbindiklatren.
3. **Pokja 2 (Penyelenggaraan, Pengendalian, dan Pemantauan Pendidikan dan Pelatihan)**
 - a. Pelaksanaan program pendidikan dengan pendekatan *cost sharing* dengan kementerian/lembaga/instansi daerah untuk memaksimalkan anggaran khususnya yang berbasis rupiah murni.

- b. Pelaksanaan program pelatihan yang lebih inklusif dengan memberikan peluang kepada para penyedia jasa pelatihan secara umum untuk dapat menjadi pelaksana pelatihan yang dibiayai Pusbindiklatren.
- c. Penyelesaian administrasi *closing date* Proyek Coremap-CTI untuk komponen pengembangan kapasitas berlangsung dengan baik dan akuntabel.
- d. Memastikan pelaksanaan dampak dari program pelatihan baik bagi pengembangan kapasitas peserta pelatihan maupun pengembangan kinerja organisasi.

4. Pokja 3 (Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana)

- a. Pemanfaatan aplikasi Sikeran untuk penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Perencana oleh instansi perencanaan pembangunan di pusat maupun daerah.
- b. Penerbitan sertifikat bagi peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana saran dari Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian PANRB.
- c. Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana dilaksanakan setiap bulan pada mulai April s.d. November 2022.
- d. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana bekerja sama dengan universitas/prodi pelaksana Pelatihan Fungsional Perencana.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	2
1.4 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
1.5 Sumber Daya Manusia	5
1.6 Potensi dan Isu Strategis	7
1.7 Sistematika Laporan	8
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Rencana Strategis 2020—2024	9
2.2 Perjanjian Kinerja Pusbindiklatren 2021	10
2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021	14
2.4 Alokasi Anggaran	14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021	15
3.2 Realisasi Anggaran Program Pusbindiklatren	29
BAB IV. PENUTUP	33
4.1 Kesimpulan	33
4.2 Rekomendasi 2021 untuk Rencana Aksi 2022	34

LAMPIRAN		37
Lampiran 1	Jumlah JFP yang Memenuhi Standar Kompetensi	38
Lampiran 2	Jumlah Karyasiswa yang Lulus Program Pendidikan	40
Lampiran 3	Jumlah Peserta Terlatih	41
Lampiran 4	Tingkat Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rincian Jumlah Pejabat Fungsional Pusbindiklatren	6
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Pusbindiklatren 2021	11
Tabel 3.1	Realisasi Kinerja Pusbindiklatren 2021	16
Tabel.3.2	Rincian Kelulusan Uji Kompetensi Fungsional Perencana Tahun 2021	17
Tabel 3.3	Jumlah Karyasiswa Program Master yang Lulus Tahun 2021	18
Tabel 3.4	Jumlah Karyasiswa Program Doktor yang Lulus Pada tahun 2021	19
Tabel 3.5	Realisasi Peserta Pelatihan yang Mendapatkan Sertifikat Tahun 2021	20
Tabel 3.6	Nilai Capaian Survei Kepuasan Program Pendidikan	21
Tabel 3.7	Nilai Capaian Survei Kepuasan Program Pelatihan	21
Tabel 3.8	Perbandingan Jumlah Pejabat Fungsional Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi Tahun 2020 dan 2021	22
Tabel 3.9	Perbandingan Jumlah Kelulusan Karyasiswa Tahun 2020 dan 2021	22
Tabel 3.10	Perbandingan Jumlah Peserta Terlatih Tahun 2020 dan 2021	23
Tabel 3.11	Realisasi Penempatan Peserta Pelatihan Tahun 2020 dan 2021	24
Tabel 3.12	Perbandingan Hasil Penilaian Kepuasan Peserta Pendidikan 2020 dan 2021	25
Tabel 3.13	Perbandingan Hasil Penilaian Kepuasan Peserta Pelatihan 2020 dan 2021	25
Tabel 3.14	Tindak Lanjut Rekomendasi 2020	26
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran 2021	29
Tabel 3.16	Realisasi Anggaran Per Penanggung Jawab	31
Tabel 3.17	Perbandingan Penyerapan Anggaran Tahun 2020 dan 2021	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas	5
Gambar 2.1	Pemetaan <i>Cascading</i> Indikator Kinerja Pusbindiklatren 2021	11
Gambar 2.2	Proses Bisnis Pusbindiklatren	13
Gambar 2.3	Rencana Kerja Tahunan Pusbindiklatren 2021	14

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Perbandingan Jumlah Pegawai Pusbindiklatren	5
Grafik 1.2	Sebaran PNS Berdasarkan Jabatan	6



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Arah kebijakan, strategi reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dilaksanakan melalui penguatan implementasi manajemen aparatur sipil negara (ASN). Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun. Beberapa kegiatan terkait penguatan implementasi manajemen ASN diantaranya penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Tahun 2020–2024, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas turut melaksanakan RPJMN dan Renstra tersebut melalui fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP), dan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan kepada Kementerian PPN/Bappenas serta institusi pusat dan daerah di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Sebagai organisasi pemerintah, Pusbindiklatren diwajibkan menyampaikan capaian kinerja organisasi setiap tahunnya. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dilakukan berdasarkan hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 dengan memperhatikan perjanjian kinerja Kepala Pusbindiklatren yang telah disepakati.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan LKj adalah untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil, serta penganggaran kegiatan yang berbasis kinerja dalam upaya mendukung Reformasi Birokrasi dan mewujudkan *good governance*. Di samping hal tersebut, penyusunan LKj ini juga dimaksudkan untuk dijadikan dasar pelaksanaan dan perbaikan kegiatan Pusbindiklatren tahun 2022.

1.3 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan LKj adalah Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomer 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Di samping itu, dalam penyusunan LKj ini mengacu pada Pedoman No. 5 tahun 2021 tentang Panduan Penyusunan Laporan Kinerja 2021 di Kementerian PPN/Bappenas.

1.4 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

1.4.1 Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Pusbindiklatren yang diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat pada Pasal 221 dan Pasal 222. Adapun tugas utama Pusbindiklatren adalah melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana, dan program pendidikan dan pelatihan kepada Kementerian PPN/Bappenas serta institusi pusat dan daerah di bidang perencanaan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusbindiklatren menyelenggarakan fungsi

1. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perencanaan pembangunan;
2. pembinaan profesi Jabatan Fungsional Perencana di pusat dan daerah;
3. pembinaan profesi Jabatan Fungsional Widyaiswara di Kementerian PPN/Bappenas;
4. penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pendidikan, dan pelatihan perencanaan;
5. penyusunan program pembinaan, pendidikan, dan pelatihan perencanaan;
6. perencanaan dan pengembangan materi pendidikan dan pelatihan perencanaan;
7. pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan;
8. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan serta saran tindak lanjut terhadap pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana serta pendidikan dan pelatihan di bidang perencanaan pembangunan;

9. pelaksanaan akreditasi dan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Perencana, pengelolaan informasi Jabatan Fungsional Perencana, dan pengelolaan informasi serta pelayanan perencana;
10. pengoordinasian kegiatan pejabat fungsional perencana dan widyaiswara di Kementerian PPN/Bappenas;
11. pelaksanaan administrasi pusat; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.4.2 Struktur Organisasi

Pada tahun 2021, Pusbindiklatren melakukan transformasi organisasi dalam rangka penyesuaian terhadap kebijakan reformasi birokrasi. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah susunan organisasi dari strukturalis menjadi fungsionalis. Untuk menjalankan fungsi tersebut, Pusbindiklatren melalui Keputusan Kepala Pusbindiklatren Nomor 001/SK/P.01/01/2021 tanggal 22 Januari 2021 membentuk kelompok kerja (Pokja), kelompok ahli, dan kelompok staf strategis.

Tujuan dibentuknya Pokja, kelompok ahli, dan kelompok staf strategis adalah untuk (1) mempermudah pembagian tugas; (2) mempermudah koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan; dan (3) mempermudah capaian kinerja masing-masing individu. Tugas dari Pokja, kelompok ahli, dan staf strategis dijelaskan dalam uraian berikut ini.

1. **Kelompok Kerja Organisasi, Tata Laksana, Administrasi, dan Keuangan (Pokja 0)**

Pokja 0 mempunyai tugas merencanakan dan mengembangkan sistem dan layanan informasi pendidikan dan pelatihan perencanaan, melakukan penyusunan tata kelola kegiatan, melaksanakan urusan persuratan, pengelolaan keuangan, dokumentasi dan pelayanan kehumasan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pusbindiklatren. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pokja 0 terdiri atas lima tim yaitu

- a. Tim Pelaksanan, Pemantauan, dan Pengendalian Anggaran;
- b. Tim Pengelolaan Administrasi Pusat;
- c. Tim Pengelolaan Teknologi dan Informasi;
- d. Tim Humas dan Komunikasi Publik; dan
- e. Tim Pengelolaan Kegiatan Khusus.

2. Kelompok Kerja Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Institusi Perencanaan Pembangunan (Pokja 1)

Pokja 1 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi, pengembangan kebijakan teknis, program, kurikulum, dan standar pendidikan dan pelatihan. Selain itu, Pokja 1 juga melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pusbindiklatren. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pokja 1 terdiri atas tiga tim yaitu

- a. Tim Kajian dan Evaluasi Kebijakan;
- b. Tim Pengembangan Program dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan; dan
- c. Tim Perencanaan dan penganggaran Program Pendidikan dan Pelatihan.

3. Kelompok Kerja Penyelenggaraan, Pengendalian, dan Pemantauan Pendidikan dan Pelatihan (Pokja 2)

Pokja 2 mempunyai tugas melaksanakan persiapan, seleksi, penempatan, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan di bidang perencanaan baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, Pokja 2 juga melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pusbindiklatren. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pokja 2 terdiri atas tiga tim yaitu

- a. Tim Pelaksanaan Pendidikan;
- b. Tim Pelaksanaan Pelatihan; dan
- c. Tim Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan.

4. Kelompok Kerja Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (Pokja 3)

Pokja 3 mempunyai tugas melaksanakan persiapan, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembinaan, dan pengembangan Jabatan Fungsional Perencana pada instansi pusat dan daerah termasuk fungsional perencana di Kementerian PPN/Bappenas. Selain itu, Pokja 3 juga melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pusbindiklatren. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pokja 3 terdiri atas dua tim yaitu

- a. Tim Pengembangan Kebijakan dan penyusunan Regulasi Jabatan Fungsional Perencana; dan
- b. Tim Pembinaan, Pengembangan, dan Penilaian Jabatan Fungsional Perencana.

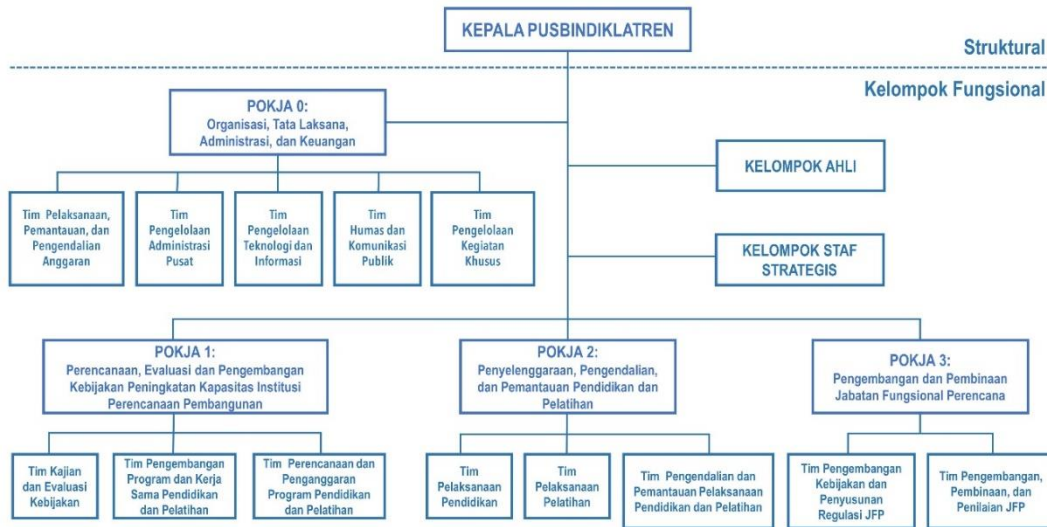
5. Kelompok Ahli

Kelompok Ahli mempunyai tugas memberikan saran, masukan, dan rekomendasi yang konstruktif, efisien, dan mudah diimplementasikan atas program dan kegiatan Pusbindiklatren dalam mendukung tugas dan fungsinya. Kelompok ini terdiri atas fungsional utama, dan tenaga ahli.

6. Kelompok Staf Strategis

Kelompok Staf Strategis mempunyai tugas memberikan analisis atas saran, masukan, dan rekomendasi dari kelompok ahli dan membantu atas pelaksanaan program dan kegiatan Pusbindiklatren dalam mendukung tugas dan fungsinya. Kelompok ini terdiri atas kelompok fungsional dan staf perencana.

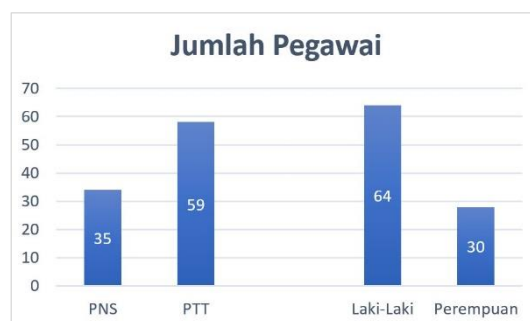
Struktur organisasi Pusbindiklatren secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas

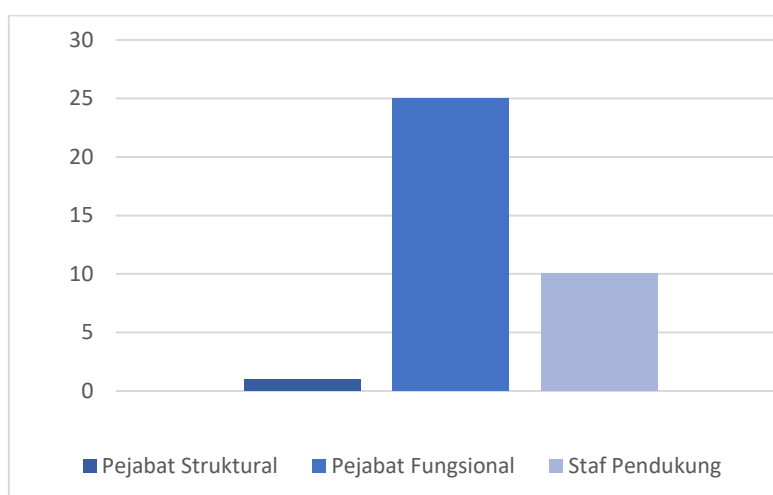
1.5 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Jumlah SDM Pusbindiklatren pada akhir tahun 2021 sebanyak 94 orang terdiri atas 35 orang (37 persen) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 59 orang (63 persen) orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Komposisi pegawai Pusbindiklatren berdasarkan jenis kelamin terdiri atas 64 orang (68 persen) berjenis kelamin laki-laki, dan sebanyak 30 orang (32 persen) berjenis kelamin perempuan. Pada tahun 2021 terjadi perubahan jumlah pegawai dikarenakan 1 orang pegawai fungsional meninggal dunia dan 1 orang pegawai fungsional memasuki masa pensiun. Komposisi SDM berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin dapat dilihat pada Grafik 1.1.



Grafik 1.1 Perbandingan Jumlah Pegawai Pusbindiklatren

Berdasarkan kelompok jabatan, PNS Pusbindiklatren terdiri atas (1) Pejabat Struktural sebanyak satu orang yaitu Pejabat Tinggi Pratama; (2) Pejabat Fungsional sebanyak 25 orang yang meliputi Fungsional Perencana, Fungsional Analisis Kebijakan, Fungsional Widyaiswara, dan Fungsional Arsiparis; dan (3) staf pendukung sebanyak 10 orang.



Grafik 1.2 Sebaran PNS Berdasarkan Jabatan

Jumlah sebaran PNS Pusbindiklatren berdasarkan jabatannya dapat dilihat pada Grafik 1.2. Sedangkan rincian jabatan fungsional beserta jenjangnya dapat dilihat dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Rincian Jumlah Pejabat Fungsional Pusbindiklatren

No	Fungsional	Jumlah					Total
		Mahir	Pertama	Muda	Madya	Utama	
1	Widyaiswara			1	2	2	5
2	Perencana		1	3	5	1	10
3	Analisis Kebijakan			4	3		7
4	Arsiparis	2			1		3
Total							25

1.6 POTENSI DAN ISU STRATEGIS

Sebagai bagian dari Kementerian PPN/Bappenas, potensi dan permasalahan strategis yang menjadi tantangan Pusbindiklatren meliputi beberapa hal berikut.

1. Kerangka Regulasi

Kebijakan pengembangan dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana meliputi (a) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) No. 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana; (b) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Perencanaan Pembangunan; (c) PermenPANRB Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional; dan (d) PermenPANRB nomor 8 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Keempat kebijakan tersebut berimplikasi terhadap proses bisnis Pusbindiklatren. Oleh karena itu, selaku instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana, Pusbindiklatren berkewajiban untuk segera menuntaskan petunjuk teknis, panduan operasional, dan melaksanakan edukasi serta advokasi kepada pemangku kepentingan atas implikasi dari perubahan-perubahan tersebut dalam pengelolaan Jabatan Fungsional Perencana.

2. Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan tusi Pusbindiklatren terkait pendidikan dan pelatihan ASN bidang perencanaan serta pengembangan dan pembinaan JFP selama ini memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN). Terbatasnya pendanaan yang berasal dari APBN/PHLN dan kebijakan Kementerian Keuangan yang tidak lagi memperbolehkan pinjaman luar negeri sebagai sumber pendanaan program pendidikan, perlu diantisipasi oleh Pusbindiklatren agar program/kegiatan yang diselenggarakan dapat berkelanjutan. Peluang berkolaborasi dengan pihak non-pemerintah perlu dijajaki dan dieksplorasi untuk mendapatkan alternatif sumber pendanaan baru dalam melaksanakan tusi fasilitasi pendidikan dan pelatihan serta pengembangan dan pembinaan JFP.

3. Teknis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pusbindiklatren

- a. Masih terdapat instansi yang belum memiliki dokumen pengembangan pegawai. Pusbindiklatren memfasilitasi penyusunan dokumen *Human Capital Development Plan* (HCDP) kepada kementerian/lembaga (K/L) dan daerah. Hal tersebut bertujuan agar pengembangan SDM bisa seoptimal mungkin memenuhi kebutuhan organisasi.
- b. Pusbindiklatren telah menyelenggarakan pelatihan dalam jaringan (*daring/online*) dengan baik. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan baik secara teknis maupun non-teknis seperti kendala jaringan dan juga efektivitas penyampaian materi pelatihan. Hal ini merupakan bahan evaluasi bagi Pusbindiklatren dalam menerapkan kebijakan pelatihan daring tahun 2022.

- c. Perkembangan pelatihan dari metode klasikal menjadi non-klasikal menjadi salah satu hal yang diupayakan oleh Pusbindiklatren. Pada tahun 2021 Pusbindiklatren mulai menyusun rencana desain pelatihan non-klasikal sebagai upaya untuk mengadopsi konsep *corporate university*. Penjajakan kerja sama dengan berbagai pihak baik dari instansi pemerintah maupun non-pemerintah perlu dilakukan oleh Pusbindiklatren.
4. Isu strategis lainnya terkait perubahan peran Pusbindiklatren di dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020–2024. Mandat presiden kepada Kementerian PPN/Bappenas sebagai *clearing house* dalam proses perencanaan pembangunan, berimplikasi terhadap Pusbindiklatren yang mendapatkan mandat sebagai *enabler* perencanaan pembangunan. Pusbindiklatren perlu menyiapkan desain program/kegiatan yang dapat mengakselerasi proses *clearing house*.

1.7 SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKJ) Pusbindiklatren Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang; tujuan; dasar hukum; tugas, fungsi, dan struktur organisasi; sumber daya manusia; potensi dan permasalahan strategis Pusbindiklatren; serta sistematika laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja. Bab ini menjelaskan mengenai rencana strategis; perjanjian kinerja; rencana kerja; serta alokasi anggaran Pusbindiklatren tahun 2021.

Bab III Akuntabilitas Kinerja. Bab ini menjelaskan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran tahun 2021. Capaian kinerja organisasi mencakup capaian indikator kinerja, perbandingan capaian kinerja 2020 dan 2021, serta capaian kinerja lainnya. Realisasi anggaran mencakup pembahasan mengenai capaian realisasi anggaran dan perbandingan realisasi anggaran tahun 2020 dan 2021.

Bab IV Penutup. Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari laporan kinerja Pusbindiklatren dan tindak lanjut yang akan dilakukan Pusbindiklatren.



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS 2020–2024

Perencanaan Kinerja Pusbindiklatren disusun berdasarkan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas tahun 2020–2024. Indikator kinerja Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas yang mendukung indikator kinerja Kementerian PPN/Bappenas adalah (1) terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional; (2) terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner; dan (3) terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Sebagai unit kerja eselon II di bawah Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas, Pusbindiklatren mendukung indikator **terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional** dan **terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM**. Kedua indikator tersebut diturunkan ke dalam sasaran kegiatan/*output* Pusbindiklatren yaitu penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan.

2.2 PERJANJIAN KINERJA PUSBINDIKLATREN 2021

Kepala Pusbindiklatren telah menandatangani Perjanjian Kinerja (PK) dengan target Indikator Kinerja seperti yang tersaji pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Pusbindiklatren 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Tahun 2021	
		Indikator Kinerja	Target 2021
1	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Jumlah Pejabat Fungsional Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi	450 orang
		Jumlah Karyasiswa yang Lulus Program Pendidikan	250 orang
		Jumlah Peserta Terlatih	675 orang
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Diklat dan Jabatan Fungsional Perencana (JFP)	Puas

Kamus indikator kinerja Pusbindiklatren dalam PK Pusbindiklatren 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Indikator Kinerja Pusbindiklatren pertama adalah target jumlah dan realisasi jumlah Pejabat Fungsional Perencana yang memenuhi standar kompetensi (peserta yang lulus uji kompetensi). Apabila dikaitkan dengan indikator kinerja Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas, kamus indikator yang digunakan adalah persentase jumlah perencana yang lulus uji kompetensi dibandingkan dengan jumlah peserta yang mengikuti uji kompetensi.
- b. Indikator Kinerja Pusbindiklatren kedua adalah target akumulasi jumlah dan realisasi akumulasi jumlah karyasiswa yang lulus program pendidikan. Apabila dikaitkan dengan indikator kinerja Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas, kamus indikator yang digunakan adalah akumulasi persentase karyasiswa (S-2 dan S-3) yang ditargetkan/direncanakan lulus pada tahun 2021 dibagi dengan jumlah karyasiswa S-2 dan S-3 dalam negeri yang ditempatkan pada tahun 2019, 2018, 2017 dan 2016.
- c. Indikator kinerja Pusbindiklatren ketiga adalah target jumlah dan realisasi jumlah peserta yang terlatih. Apabila dikaitkan dengan indikator kinerja Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas, kamus indikator yang digunakan adalah jumlah peserta yang mendapatkan sertifikat pelatihan dibagi dengan jumlah total peserta yang mengikuti pelatihan.
- d. Indikator kinerja Pusbindiklatren keempat adalah tingkat kepuasan pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diukur dengan menggunakan kriteria tingkat kepuasan penerima pelayanan sesuai dengan standar pelayanan prima Pusbindiklatren. Indikator kepuasan karyasiswa pendidikan

dilihat dari empat aspek: (1) penyebaran informasi; (2) pelayanan staf; (3) penempatan; serta (4) pendaftaran dan seleksi. Sedangkan indikator pelatihan meliputi (i) penyebaran informasi; (ii) pelayanan Pusbindiklatren; (iii) penempatan; dan (iv) pendaftaran dan seleksi; serta (v) kurikulum. Dalam hal indikator keempat ini, Indikator kinerja Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas menggunakan kamus indikator yang sama.

Dari keempat indikator kinerja Pusbindiklatren tersebut di atas, rata-rata persentase indikator poin (a), poin (b), dan poin (c) merupakan persentase perencana yang memenuhi standar kompetensi, mendukung sasaran strategis/program Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas yaitu **terwujudnya integrasi, sinkronisasi, sinergi perencanaan pembangunan nasional**. Sementara indikator poin (d) merupakan bagian dari Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mendukung sasaran strategis/program **terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM**.

2.2.1 Cascading Indikator Kinerja Pusbindiklatren 2021

Pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) Pusbindiklatren dimulai dengan menyusun pemetaan Indikator Kinerja Pusbindiklatren dengan indikator dan target yang telah ditetapkan seperti pada Gambar 2.1 berikut.

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan		<p>Jumlah JFP yang memenuhi standar kompetensi</p> <p>Jumlah karyawan yang lulus pendidikan</p> <p>Jumlah peserta terlatih</p> <p>Tingkat kepuasan pelayanan, penyelenggaraan, dan informasi diklat</p>	<p>450 orang</p> <p>250 orang</p> <p>675 orang</p> <p>Puas</p>

Gambar 2.1 Pemetaan *Cascading* Indikator Kinerja Pusbindiklatren 2021

Dalam Gambar 2.1, Pusbindiklatren menjalankan tugasnya dengan mengacu pada beberapa hal berikut:

- a. Sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas yang menyebutkan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan tersebut dijalankan oleh Kepala Pusbindiklatren dengan teknis pelaksanaan dilakukan oleh Ketua Pokja sebagai koordinator dari tim pokja dibawahnya, Tenaga Ahli, dan Kelompok Staf Strategis.
- b. Pengukuran program yang dijalankan oleh Pusbindiklatren dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja. Pada tahun 2021, indikator kinerja Pusbindiklatren terdiri atas empat hal, yaitu (1) jumlah Pejabat Fungsional Perencana yang memenuhi standar kompetensi dengan target **450 orang**; (2) jumlah mahasiswa yang lulus program pendidikan dengan target **250 orang**; (3) jumlah peserta terlatih dengan target **675 orang**; dan (4) tingkat kepuasan pelayanan penyelenggaraan diklat dengan target **Puas**.
- c. Kontribusi setiap kelompok kerja dalam pencapaian sasaran strategis, program, indikator kinerja dan target sebagai berikut:
 - 1) Pokja Penyelenggaraan, Pengendalian, dan Pemantauan Pendidikan dan Pelatihan mendukung indikator kinerja jumlah mahasiswa yang lulus pendidikan, jumlah peserta terlatih, dan tingkat kepuasan pelayanan penyelenggaraan diklat.
 - 2) Pokja Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana mendukung indikator kinerja jumlah Pejabat Fungsional Perencana yang memenuhi standar kompetensi dan tingkat kepuasan pelayanan fasilitas JFP.
 - 3) Pokja Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Institusi Perencanaan Pembangunan dan Pokja Organisasi, Tata Laksana, Administrasi, dan Keuangan melalui fasilitas pembinaan dan diklat perencana mendukung keempat indikator kinerja Pusbindiklatren.

2.2.2 Proses Bisnis (*Business Process*) Pusbindiklatren

Proses bisnis Pusbindiklatren dalam pencapaian tujuan nasional melalui Renstra Kementerian PPN/Bappenas maupun Renstra Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, dijelaskan dalam Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Proses Bisnis Pusbindiklatren

Berdasarkan Gambar 2.2 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tugas yang dilaksanakan oleh Pusbindiklatren adalah memberikan fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana, dan program pendidikan dan pelatihan kepada Kementerian PPN/Bappenas serta institusi pusat dan daerah di bidang perencanaan pembangunan nasional. Sementara itu, fungsi yang dilaksanakan oleh Pusbindiklatren adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perencanaan pembangunan dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana di pusat dan daerah.
- b. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dijalankan (1) kelompok kerja (Pokja) yang terdiri atas (a) Pokja Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Institusi Perencanaan Pembangunan; (b) Pokja Penyelenggaraan, Pengendalian, dan Pemantauan Pendidikan dan Pelatihan; (c) Pokja Pengembangan dan Pembinaan JFP, dan (d) Pokja Organisasi, Tata Laksana, Administrasi dan Keuangan; (2) kelompok ahli; dan (3) kelompok staf strategis
- c. Tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Pusbindiklatren diharapkan mampu meningkatkan (1) kompetensi SDM perencana; (2) kapasitas institusi perencanaan; dan (3) sinergi perencanaan untuk mencapai tujuan nasional;
- d. Perencanaan pembangunan berkualitas merupakan salah satu sarana dalam mencapai tujuan nasional. Dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas tersebut, Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan berbagai *stakeholder* yaitu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan lembaga donor.

2.3 RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 2021

Pencapaian indikator kinerja diterjemahkan ke dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pusbindiklatren. Pembagian tugas dari masing-masing kegiatan tersebut dilakukan para koordinator tim yang relevan. Terdapat beberapa perubahan terkait RKT Pusbindiklatren 2021, diantaranya (1) perubahan indikator kinerja utama yang semula berbasis persentase menjadi berbasis jumlah; dan (2) anggaran yang semula dialokasikan Rp124.990.000.000 menjadi Rp150.318.935.000. RKT Pusbindiklatren Tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 2.3.

RENCANA KERJA TAHUNAN PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN PERENCANA TAHUN 2021

IKU ES II	NO	KEGIATAN	WAKTU/BULAN PELAKSANAAN												ALOKASI SDM		KETERANGAN		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Koordinator	Anggota Tim			
	A	PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERENCANA																	
1. Persentase Perencana yang memenuhi Standar Kompetensi. Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	1	Persentase Jabatan Fungsional Perencana yang Lulus Uji Kompetensi															Rita Miranda	Anggota Tim Fasilitas dan Pembinaan JFP	Di dukung anggaran sebesar Rp149.790.000.000. Telah dilakukan revisi anggaran menjadi sebesar Rp124.990.000.000
	2	Persentase Karyasiswa yang Lulus Pendidikan															Wiky Witarni	Anggota Tim Pendidikan	
	3	Persentase peserta Pelatihan yang mengikuti dan Lulus program Pelatihan															Ali Muharam	Anggota Tim Pelatihan	
	B	PERENCANAAN, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KAPASITAS INSTITUSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN																	
2. Persentase Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional yang dijalankan Unit Kerja eselon I, II, dan Stakeholder.	1	Persentase Pengembangan Kebijakan pembinaan jabatan fungsional perencana dan pengembangan pendidikan dan pelatihan perencana yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Eselon I, II, dan Stakeholder															Wignyo Adiyoso	Anggota Tim Perencanaan dan Pengembangan	
		C	PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
3. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	1	Tingkat Kepuasan atas layanan pembinaan jabatan fungsional perencana dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan															Pandu Pradhana	Anggota tim Pokja 0, Pokja Pendidikan dan Pelatihan, dan Pokja Fasilitas dan Pembinaan JFP	

Gambar 2.3 Rencana Kerja Tahunan Pusbindiklatren 2021

2.4 ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2021

Jumlah alokasi anggaran Pusbindiklatren tahun 2021 mengalami perubahan dari jumlah yang ditetapkan pada awal tahun yaitu sebesar Rp149.790.000.000 menjadi sebesar Rp150.318.935.000, yang terdiri atas (1) Rupiah Murni (RM) Pusbindiklatren sebesar Rp35.314.850.000, Lintas DM III dan DM IV sebesar Rp4.824.840.000 dan Lintas Bidang sebesar Rp1.468.236.000; (2) Rupiah Murni Pendamping (RMP) Rp15.895.125.000; serta (3) Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp92.815.884.000 (*loan* PHRD IV Rp74.986.884.000 dan COREMAP-CTI Rp17.829.000.000). Anggaran 2021 tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah Rp183.348.216.000.





BAB III.

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA ORGANISASI TAHUN 2021

3.1.1 Capaian Indikator Kinerja (sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021)

Pada tahun 2021, kinerja Pusbindiklatren secara keseluruhan telah mencapai target yang telah ditetapkan. Secara detail, capaian kinerja Pusbindiklatren dapat dilihat pada Tabel 3.1 yang mencakup (1) jumlah Pejabat Fungsional Perencana yang memenuhi standar kompetensi dengan target 450 orang dan terealisasi sebanyak 823 orang; (2) jumlah karyasiswa yang lulus program pendidikan dengan target 250 orang dan realisasi 369 orang; (3) jumlah peserta terlatih dengan target 675 orang dan realisasi 1.952 orang; serta (4) tingkat kepuasan pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan hasil puas.

Tabel 3.1 Realisasi Kinerja Pusbindiklatren 2021

No.	Sasaran Strategis/Program	Sasaran Kegiatan/Output	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
1	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pejabat Fungsional	450 orang	823 orang	Melebihi target
			Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi			
			Jumlah Karyawan yang Lulus Program Pendidikan	250 orang	369 orang	Melebihi target
			Jumlah Peserta Terlatih	675 orang	1.952 orang	Melebihi target
2	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	Tingkat kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), serta Jabatan Fungsional Perencana (JFP)	Puas	Puas	Memenuhi tingkat kepuasan

Seluruh indikator kinerja yang ditetapkan oleh Pusbindiklatren telah tercapai dan melampaui target. Hal ini tidak terlepas dari evaluasi yang dilakukan baik secara eksternal maupun internal. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi masalah serta potensi masalah yang akan mengganggu pencapaian target yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti rapat rutin, rapat koordinasi dengan pelaksana diklat (program studi atau lembaga/unit di perguruan tinggi), kunjungan langsung kepada karyawan dan peserta, evaluasi program beasiswa diklat, serta kegiatan lainnya. Penjelasan lebih rinci dari masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah Pejabat Fungsional Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi

Pusbindiklatren sebagai instansi pembina fungsional perencana berkewajiban membina perencana di pusat maupun di daerah. Pembinaan perencana dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan dan uji kompetensi yang mengacu pada PermenPANRB No. 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana. Pada tahun 2021, penyelenggaraan pelatihan fungsional perencana hanya diwajibkan untuk jenjang Perencana Ahli Pertama. Sementara untuk memenuhi standar kompetensi, Pusbindiklatren juga melaksanakan uji kompetensi untuk Perencana Ahli Pertama, Muda, Madya, dan Utama.

Dari indikator jumlah pejabat fungsional perencana yang memenuhi standar kompetensi pada tahun 2021, Pusbindiklatren menargetkan sebanyak 450 orang dan terealisasi sebanyak 823 orang. Apabila dikaitkan dengan indikator kinerja Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas, kamus indikator yang digunakan adalah persentase perencana yang lulus uji kompetensi dibandingkan dengan jumlah peserta yang mengikuti uji kompetensi. Jumlah peserta yang lulus sebanyak 823 orang dan yang mengikuti uji kompetensi sebanyak 1.362 orang, maka persentase capaian adalah sebesar 60,43%. Perincian peserta yang mengikuti dan lulus uji kompetensi dapat dilihat dalam Tabel 3.2.

Capaian kinerja pusbindiklatren melebihi target dikarenakan; (a) pelaksanaan uji kompetensi dilakukan secara daring; dan (b) perubahan kebijakan yang mewajibkan perencana mengikuti uji kompetensi untuk naik dan perpindahan jabatan. Sedangkan penyebab peserta tidak lulus uji kompetensi antara lain (1) mekanisme uji kompetensi baru dilaksanakan pertama kali tanpa didahului dengan pelatihan; (2) peserta yang mengikuti uji kompetensi dikarenakan pindah jabatan tidak mempunyai pengetahuan terkait dengan perencanaan pembangunan; dan (3) tidak memiliki persiapan waktu dan materi untuk mengikuti uji kompetensi.

Tabel.3.2 Rincian Kelulusan Uji Kompetensi Fungsional Perencana Tahun 2021

KEGIATAN	PENILAIAN AKHIR UJI KOMPETENSI					
	PESERTA			PERSENTASE		
	Mengikuti	Lulus	Tidak Lulus	Mengikuti	Lulus	Tidak Lulus
Uji Kompetensi Langsung	1161	622	539	100,00	53,57	46,43
1. Jenjang Ahli Pertama	251	162	89	100,00	64,54	35,46
2. Jenjang Ahli Muda	727	336	391	100,00	46,22	53,78
3. Jenjang Ahli Madya	174	118	56	100,00	67,82	32,18
4. Jenjang Ahli Utama	9	6	3	100,00	66,67	33,33
Uji Kompetensi melalui Pelatihan	201	201	0	100,00	100,00	0,00
1. Fungsional Ahli Pertama	201	201	0	100,00	100,00	0,00
Total Keseluruhan	1.362	823	539	100	60,43	39,57

2. Jumlah Karyasiswa yang Lulus Program Pendidikan

Di samping sebagai instansi pembina jabatan fungsional perencana, Pusbindiklatren juga melaksanakan fungsi sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Program pendidikan dimaksudkan untuk mewujudkan ASN perencana yang berkualitas dengan memberikan peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan multidisiplin.

Dari indikator jumlah karyasiswa yang lulus program pendidikan pada tahun 2021, Pusbindiklatren menargetkan sebanyak 250 karyasiswa dan terealisasi sebanyak 369 karyasiswa. Jumlah karyasiswa yang lulus sebanyak 369, dengan perincian (a) karyasiswa yang lulus tepat waktu sebanyak 271 (program master dan doktor), (b) karyasiswa yang lulus lebih cepat sebanyak 4 orang (program master), dan (c) karyasiswa yang lulus dari angkatan tahun 2016, 2017, dan tahun 2018 untuk program master sebanyak 88, serta (d) karyasiswa yang lulus dari angkatan 2016 dan 2017 untuk program doktor sebanyak 6 orang. Apabila dikaitkan dengan indikator kinerja Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, kamus indikator yang digunakan adalah akumulasi jumlah karyasiswa lulus yang ditempatkan pada tahun X dibagi dengan jumlah karyasiswa yang ditempatkan pada tahun X, dapat dilihat dalam Tabel 3.3 dan Tabel 3.4.

Tabel 3.3 Jumlah Karyasiswa Program Master yang Lulus Tahun 2021

Tahun	Penempatan Program Master	Kelulusan Tahun 2021				Belum Lulus	
		Karyasiswa		Akumulasi			
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
2016	437	1	0,23	432	98,86	5	1,14
2017	408	4	0,98	403	98,77	5	1,23
2018	410	83	20,24	389	94,87	21	5,12
2019	411	270	65,69	270	65,69	141	34,31
2020	323	4*	1,24	4	1,24	319	98,76
Total		362	88,38	1.363		491	

*) karyasiswa yang lulus lebih cepat dari durasi yang ditetapkan

Penyebab belum lulusnya beberapa karyasiswa antara lain, (1) periode tugas belajar sudah selesai dan karyasiswa harus kembali bekerja ke instansi asal; (2) masalah pribadi; (3) ganti topik tesis/disertasi; (4) data tesis/disertasi belum tersedia; (5) pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19); dan (6) perberlakuan kebijakan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. B/323/B.BI/SE/2019 tertanggal 31 Mei 2019 perihal Publikasi Karya Ilmiah Program Pascasarjana.

Sedangkan karyasiswa yang lulus lebih cepat dari durasi yang ditetapkan dikarenakan (a) komitmen karyasiswa untuk lulus cepat, (b) komunikasi dan dukungan dengan pembimbing tesis. Adapun empat karyasiswa tersebut berasal dari program studi Magister Perencanaan Pengembangan Wilayah, Unhas (2 orang) Magister Ekonomika Pembangunan, UGM (1 orang), dan Magister Ilmu Lingkungan, Undip (1 orang).

Tabel 3.4 Jumlah Karyasiswa Program Doktor yang Lulus Pada tahun 2021

Tahun	Penempatan Program Doktor	Kelulusan Tahun 2021				Belum lulus 2021	
		Karyasiswa		Akumulasi		Program	
		Jumlah	Persentase	S-3	Persentase	S-3	Persentase
2016	12	3	25,00	10	83,33	2	16,67
2017	9	3	33,33	5	56,56	4	44,44
2018	3	1	33,33	1	33,33	2	66,67
Total Kelulusan		7	91,67	16		8	

Pusbindiklatren telah melakukan perbaikan pelaksanaan program pendidikan. Beberapa perbaikan program pendidikan, yaitu (1) pemantauan karyasiswa yang melebihi batas waktu program Pendidikan; (2) pemberian tunjangan publikasi ilmiah untuk karyasiswa *linkage* premium; (3) penambahan sasaran instansi program beasiswa Pusbindiklatren yang mempunyai uraian pekerjaan berhubungan dengan perencanaan pembangunan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu); dan (4) penerimaan latar belakang Pendidikan (D-4) untuk Program Beasiswa *Split-Site* Australia Awards in Indonesia (*Split-Site* AAI).

Pada tahun 2021 Pusbindiklatren telah menempatkan 328 karyasiswa penerima beasiswa program pendidikan. Program pendidikan yang diselenggarakan meliputi program S-2 dalam negeri (267 karyasiswa), S-2 tematik (22 karyasiswa), S-2 afirmasi (25 karyasiswa), dan *Split Site Master Program* (14 karyasiswa).

3. Jumlah Peserta Terlatih

Program pelatihan yang diselenggarakan pada tahun 2021 meliputi pelatihan teknis dan spesifik. Pelatihan teknis dimaksudkan untuk memberikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang perencanaan pembangunan. Sementara itu, pelatihan spesifik dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang/sector tertentu dengan perspektif atau sudut pandang perencanaan pembangunan.

Dari indikator jumlah peserta terlatih pada tahun 2021, Pusbindiklatren menargetkan sebanyak 675 orang dan terealisasi sebanyak 1.952 orang. Apabila dikaitkan dengan indikator kinerja Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas, kamus indikator yang digunakan yaitu persentase peserta yang mendapatkan sertifikat pelatihan dibandingkan dengan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan, maka realisasi 1.952 peserta terlatih tersebut merupakan 99,54 persen dari 1.959 peserta yang mengikuti pelatihan.

Sebanyak 7 peserta pelatihan (0,36 persen) yang tidak lulus dikarenakan tidak memenuhi syarat persentase minimal kehadiran pelatihan untuk mendapatkan sertifikat. Realisasi peserta pelatihan yang mendapatkan sertifikat sebagaimana Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Realisasi Peserta Pelatihan yang Mendapatkan Sertifikat Tahun 2021

No.	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta Terlatih (orang)
Pelatihan Teknis		1.016
1	<i>Monitoring dan Evaluasi</i>	203
2	<i>Planning & Budgeting</i>	293
3	Perencanaan Pembangunan Daerah- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PPD RPJMD)	244
4	Fungsional Perencana Pertama	201
5	Rencana Strategis (Renstra)	75
Pelatihan Spesifik		936
1	<i>Public Private Partnership (PPP)</i>	76
2	Perencanaan Mitigasi Bencana	85
3	Perencanaan Lingkungan dalam Pembangunan	51
4	Kelayakan Proyek	48
5	<i>Local Economic Resource Development (LERD)</i>	55
6	<i>City Planning</i>	149
7	<i>Coral Reef Rehabilitation and Management-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI)</i>	143
8	<i>Basic English for Academic Purposes (BEAP)</i>	176
9	<i>Professional Human Resources Development (PHRD) IV-Luar Negeri</i>	82
10	<i>Executive Development Programme (EDP)</i> kerja sama dengan Nanyang Technological University (NTU) dan Temasek Foundation	23
11	<i>Public Administration for Green Economy Development in Indonesia</i> kerja sama dengan Singapore Cooperation Enterprise (SCE) dan Temasek Foundation	48
Total		1.952

Untuk tahun 2021, Pusbindiklatren telah melakukan perbaikan dalam pelaksanaan program pelatihan. Beberapa perbaikan program pelatihan, yaitu (1) pemilihan pelaksana pelatihan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian proposal; (2) pelaksanaan pelatihan secara *hybrid*; (3) pemberian biaya penggantian paket data langsung dilakukan oleh Pusbindiklatren; dan (4) pemantauan substansi dan administrasi pada pelaksanaan pelatihan.

4. Tingkat Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Tingkat kepuasan pelayanan pendidikan dan pelatihan diukur dengan menggunakan kriteria tingkat kepuasan penerima pelayanan sesuai dengan standar pelayanan prima Pusbindiklatren. Untuk mengukur tingkat kepuasan tersebut, Pusbindiklatren melakukan survei tingkat kepuasan kepada karyasiswa pendidikan dan peserta pelatihan (teknis, spesifik, dan JFP).

Jumlah responden program pendidikan pada tahun 2021 sebanyak 310 orang yang mengikuti program S-2 Dalam Negeri (program S-2 Afirmasi dan program S-2 Reguler) serta program S-2 *Linkage (Split-Site)*. Pertanyaan yang diajukan untuk program pendidikan mencakup empat aspek penilaian yaitu penyebaran informasi, pelayanan staf, penempatan, serta pendaftaran dan seleksi.

Hasil survei menunjukkan sebagian besar responden menyatakan puas dengan persentase kepuasan mencapai 96,56 persen. Dengan demikian, Pusbindiklatren sudah memenuhi tingkat kepuasan pelayanan sebagaimana ditetapkan di dalam perjanjian kinerja. Tabulasi capaian hasil pelayanan penyelenggaraan diklat dapat dilihat dalam Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Nilai Capaian Survei Kepuasan Program Pendidikan

No.	Aspek Penilaian	NILAI Capaian 2021
		Persentase Kepuasan
1	Penyebaran Informasi	91,29
2	Pelayanan Staf	100
3	Penempatan	99,02
4	Pendaftaran dan Seleksi	95,94
RATA-RATA		96,56

Selain itu, Pusbindiklatren juga melakukan survei terhadap peserta program pelatihan baik pelatihan teknis, spesifik maupun fungsional perencana. Jumlah responden program pelatihan tahun 2021 berjumlah 860 peserta. Pertanyaan yang diajukan untuk program mencakup lima aspek penilaian yaitu penyebaran informasi, pelayanan, penempatan, pendaftaran dan seleksi serta kurikulum.

Hasil survei kepada peserta pelatihan menunjukkan sebagian besar responden menyatakan puas dengan persentase kepuasan mencapai 97,34 persen. Dengan demikian, Pusbindiklatren sudah memenuhi tingkat kepuasan pelayanan sebagaimana ditetapkan di dalam perjanjian kinerja. Tabulasi capaian hasil pelayanan penyelenggaraan diklat dapat dilihat dalam Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Nilai Capaian Survei Kepuasan Program Pelatihan

No.	Aspek Penilaian	Nilai Capaian 2021
		Persentase
1	Penyebaran Informasi	96,63
2	Pelayanan Pusbindiklatren	99,07
3	Penempatan	97,38
4	Pendaftaran dan Seleksi	97,00
5	Kurikulum	96,63
RATA-RATA		97,34

3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja 2020–2021

1. Jumlah Pejabat Fungsional Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi

Dari segi jumlah pejabat fungsional yang memenuhi standar kompetensi pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 266 orang (47,8 persen). Kenaikan peserta uji kompetensi dan lulus uji kompetensi dikarenakan ada beberapa hal diantaranya (a) regulasi PermenPANRB No. 4 tahun 2020 Pasal 16 yang mengatur perpindahan jabatan dari jabatan lain ke Jabatan Fungsional Perencana; (b) meningkatnya minat PNS dengan jabatan lain untuk berpindah ke Jabatan Fungsional Perencana; dan (c) PermenPANRB Nomor 28 tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi kedalam Jabatan Fungsional. Perbandingan jumlah pejabat fungsional perencana yang memenuhi standar kompetensi tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat dalam Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Perbandingan Jumlah Pejabat Fungsional Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi Tahun 2020 dan 2021

Tahun	Target	Peserta yang mengikuti diklat	Peserta yang Lulus Uji Kompetensi	Persentase
2020	450	559	557	99,6
2021	450	1.362	823	60,4

2. Jumlah Karyasiswa yang Lulus Pada Program Pendidikan

Dari segi jumlah, karyasiswa yang lulus pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 35 orang (10,48 persen). Kenaikan kelulusan karyasiswa dikarenakan (a) pemantauan secara regular kepada karyasiswa; dan (b) koordinasi dengan program studi tentang perkembangan karyasiswa. Perbandingan karyasiswa yang lulus pada program pendidikan tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat dalam Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Perbandingan Jumlah Kelulusan Karyasiswa Tahun 2020 dan 2021

Tahun	Target	Realisasi
2020	250	334
2021	250	369

3. Jumlah Peserta Terlatih

Jumlah peserta mengikuti pelatihan pada tahun 2021 secara total adalah 1.959 orang, sementara pada tahun 2020 jumlah peserta pelatihan hanya sebanyak 1.706 orang. Dengan demikian, terjadi kenaikan peserta pelatihan sebanyak sebanyak 253 orang. Meskipun jumlah peserta pelatihan mengalami peningkatan, dari sisi persentase peserta yang lulus (memperoleh sertifikat pelatihan) mengalami penurunan menjadi 99,64 persen pada tahun 2021.

Peningkatan jumlah peserta pelatihan pada tahun 2021 dikarenakan (a) bertambahnya jenis pelatihan yang tersedia; (b) pelatihan dilaksanakan secara daring sehingga alokasi biaya lebih efisien; (c) penambahan program pelatihan yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri; dan (d) pelaksanaan pelatihan luar negeri program PHRD IV dilaksanakan secara *hybrid*. Perbandingan jumlah peserta pelatihan dan peserta yang mendapatkan sertifikat pelatihan tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat dalam Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Perbandingan Jumlah Peserta Terlatih Tahun 2020 dan 2021

Tahun	Target	Peserta yang mengikuti diklat	Peserta yang mendapatkan sertifikat	Persentase Peserta terlatih
2020	675	1.708	1.708	100
2021	675	1.959	1.952	99,64

Program Pelatihan Pusbindiklatren dibagi menjadi Pelatihan Teknis dan Pelatihan Spesifik. Pada tahun 2021, Pelatihan Teknis diikuti 1.021 peserta dan Pelatihan Spesifik diikuti 938 peserta. Jumlah peserta Pelatihan Teknis pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 sebanyak 279 peserta. Hal ini dikarenakan tidak diselenggarakannya tiga topik pelatihan, yaitu Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD), *Clearing House*, dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Penurunan jumlah peserta pelatihan yang cukup signifikan adalah Pelatihan Fungsional Perencana dari total 559 peserta menjadi 201 peserta. Sementara itu, untuk Pelatihan Spesifik terdapat peningkatan jumlah peserta sebanyak 530 peserta. Hal ini dikarenakan terdapat topik pelatihan baru, yaitu COREMAP-CTI, Pelatihan PHRD IV, *Executive Development Programme* (EDP), dan *Public Administration for Green Economy Development in Indonesia*. Kenaikan jumlah peserta pelatihan yang cukup signifikan terjadi pada topik pelatihan (1) *Monitoring* dan *Evaluasi*; (2) *Planning and Budgeting*; dan (3) *City Planning*.

Tabel 3.11 Realisasi Penempatan Peserta Pelatihan Tahun 2020 dan 2021

No.	Nama Pelatihan	Jumlah Penempatan (orang)	
		2020	2021
Pelatihan Teknis		1.300	1.021
1	<i>Monitoring dan Evaluasi</i>	48	203
2	<i>Planning & Budgeting</i>	101	298
3	PPD RPJMD	298	244
4	Fungsional Perencana Pertama	559	201
5	Renstra	64	75
6	DAK	162	-
7	<i>Clearing House</i>	34	-
8	PPD	34	-
Pelatihan Spesifik		408	938
1	<i>Public Private Partnership (PPP)</i>	46	76
2	Perencanaan Mitigasi Bencana	46	87
3	Perencanaan Lingkungan dalam Pembangunan	47	51
4	Kelayakan Proyek	22	48
5	<i>Local Economic Resource Development (LERD)</i>	48	55
6	<i>City Planning</i>	75	149
7	COREMAP-CTI	-	143
8	<i>Basic English for Academic Purposes (BEAP)</i>	124	176
9	PHRD-LN	-	82
10	<i>Executive Development Programme (EDP)</i> kerja sama dengan Nanyang Technological University (NTU) dan Temasek Foundation	-	23
11	<i>Public Administration for Green Economy Development in Indonesia</i> kerja sama dengan Singapore Cooperation Enterprise (SCE) dan Temasek Foundation	-	48
Total		1.708	1.959

4. Tingkat Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Dari Tabel 3.12 di bawah ini, terjadi penurunan hasil capaian pelayanan program pendidikan dari hasil capaian tahun 2020 sebesar 2,56 poin. Indikator penyebaran informasi mengalami penurunan 4,13 poin. Sementara indikator pendaftaran dan seleksi mengalami penurunan sebesar 2,84 poin. Hal ini dikarenakan pandemi Covid-19 yang menyebabkan kebijakan pendaftaran dan seleksi yang semula dilakukan secara *offline* menjadi *online* (daring). Di samping itu, terjadi kendala jaringan pada saat seleksi akademik.

Tabel 3.12 Perbandingan Hasil Penilaian Kepuasan Peserta Pendidikan 2020 dan 2021

No.	Indikator Penilaian	Nilai Capaian	
		2020	2021
1	Penyebaran Informasi	95,42	↓ 91,29
2	Pelayanan Staf	99,57	↑ 100
3	Penempatan	99,02	= 99,02
4	Pendaftaran dan Seleksi	98,78	↓ 95,94
RATA-RATA		99,12	↓ 96,56

Selain itu, Pusbindiklatren juga melakukan survei terhadap peserta program pelatihan baik pelatihan teknis, spesifik, maupun fungsional perencana. Jumlah responden program pelatihan tahun 2021 ialah berjumlah 860 peserta. Pertanyaan yang diajukan mencakup lima aspek penilaian yaitu penyebaran informasi, pelayanan Pusbindiklatren, penempatan, pendaftaran dan seleksi, serta kurikulum.

Tabel 3.13 Perbandingan Hasil Penilaian Kepuasan Peserta Pelatihan 2020 dan 2021

No.	Indikator Penilaian	Nilai Capaian	
		2020	2021
1	Penyebaran Informasi	-	96,63
2	Pelayanan Pusbindiklatren	99,73	↓ 99,07
3	Penempatan	-	97,38
4	Pendaftaran dan Seleksi	99,73	↓ 97,00
5	Kurikulum	98,76	↓ 79,00
RATA-RATA		99,41	↓ 93,82

Dari Tabel 3.13, hasil nilai capaian pelayanan program pelatihan pada tahun 2021 mengalami penurunan dari capaian tahun 2020. Penurunan terbesar terletak pada indikator penilaian kurikulum yaitu sebesar 19,76 poin. Hal ini dikarenakan peserta belum familiar dengan penyampaian materi dalam kurikulum secara daring. Selain itu, beberapa peserta juga mengalami kendala jaringan. Meskipun demikian, nilai capaian tersebut masih dikategorikan memenuhi tingkat kepuasan peserta.

3.1.3 Capaian Kinerja Lainnya

3.1.3.1 Tindak Lanjut Rekomendasi Kegiatan Tahun 2020

Hasil rekomendasi kegiatan Pusbindiklatren tahun 2020 yang telah ditindaklanjuti oleh Pusbindiklatren pada tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.14 di bawah ini.

Tabel 3.14 Tindak Lanjut Rekomendasi 2020

No.	Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut 2021	Dampak Tindak Lanjut
1	Struktur organisasi dan mekanisme kerja terkait dengan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional	Mengubah struktur organisasi dan pola kerja Pusbindiklatren menjadi fungsionalis yang diwujudkan melalui pembentukan kelompok kerja	Tercapainya kinerja Pusbindiklatren walaupun terjadi perubahan struktur organisasi menjadi lebih fungsionalis.
2	Mendukung peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai <i>enabler</i> pelaksanaan rencana pembangunan melalui pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas perencana pusat dan daerah	Penyelenggaraan program-program Pusbindiklatren yang berdasarkan kebutuhan instansi perencanaan pembangunan.	Terwujudnya program pendidikan dan pelatihan Pusbindiklatren yang sesuai dengan kebutuhan perencana sehingga mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang baik.
3	Peningkatan pelayanan terhadap para Pejabat Fungsional Perencana melalui aplikasi Sistem Penilaian Kinerja Perencana (Sikeren)	Sudah dilakukan sosialisasi penggunaan aplikasi Sikeren	Memudahkan perencana dan Tim Penilai dalam pengumpulan dan penilaian angka kredit.
4	Melakukan perbaikan dan penyempurnaan (a) IKU 2020 beserta kamus indikatornya; (b) IKU Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas 2020–2024; dan (c) <i>cascading</i> tusi dan SKP masing-masing pegawai 2020	Sudah dilakukan pembahasan di lingkup Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas	Revisi Renstra Pusbindiklatren
5	Penerapan SOP/mekanisme kerja Pusbindiklatren yang terintegrasi	Sudah disusun SOP Pusbindiklatren	Melakukan evaluasi penerapan dan reuiu SOP

3.1.3.2 Inovasi Pusbindiklatren Tahun 2021

Tahun 2021, Pusbindiklatren telah mengembangkan 12 inovasi untuk peningkatan kinerja, sebagai berikut.

1. **Direktori Alumni Program Pendidikan.** Pembuatan direktori alumni dan publikasi informasi pada situs Pusbindiklatren merupakan salah satu inovasi penyelenggaraan pendidikan. Direktori tersebut menjadi sarana pertanggungjawaban akuntabilitas pelaksanaan kegiatan beasiswa pendidikan, penguatan jejaring, peningkatan layanan kepada publik, serta *knowledge management* pada tingkat dasar. Dengan adanya direktori tersebut, pengakses diharapkan mampu mendapatkan manfaat yakni penguatan jejaring, penguatan basis kewilayahan, serta kemudahan akses informasi mengenai informasi alumni, program studi, dan judul tesis yang telah diterbitkan.
2. **Survei Umpan Balik Kegiatan Klinik ASN Perencana.** Pembuatan umpan balik kegiatan Klinik ASN Perencana (Kliper) menjadi sarana bagi peserta Kliper untuk memberikan penilaian terhadap layanan yang diterima. Dalam Kliper, peserta melakukan konsultasi terhadap permasalahan dan/atau pertanyaan yang dimiliki, untuk kemudian mendapatkan jawaban dari Pusbindiklatren. Dari pelaksanaan, pemberian jawaban, dan cara pemberian jawaban, Pusbindiklatren dapat menerima penilaian pemberian layanan untuk perencana melalui survei umpan balik Kliper yang diisi oleh peserta guna memastikan kualitas layanan yang diberikan oleh Pusbindiklatren.
3. **Publikasi Ikhtisar Laporan Kinerja (LKj) Pusbindiklatren.** Penyusunan dan publikasi Ikhtisar LKj Pusbindiklatren pada situs *web* Pusbindiklatren merupakan inovasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas Pusbindiklatren. Dengan adanya Ikhtisar LKj dalam situs *web* maka masyarakat atau pemangku kepentingan Pusbindiklatren dapat memperoleh informasi mengenai kinerja Pusbindiklatren khususnya terkait pencapaian terhadap indikator kinerja Pusbindiklatren. Penyajian dalam bentuk ringkasan diharapkan memudahkan para pembaca dalam menangkap informasi kinerja Pusbindiklatren secara keseluruhan.
4. **Penerapan *Social Media Marketing* pada Media Sosial Resmi Pusbindiklatren Bappenas,** yang merupakan bentuk *area of improvement* dan strategi komplementer Tim Humas Pusbindiklatren untuk melaksanakan sosialisasi/publikasi program/produk, memperkuat akuntabilitas instansi dalam pelayanan publik, upaya adaptif dalam transformasi teknologi dan digital, dan memperkuat *engagement* dan *reach*. Bentuk pengembangan yakni dengan memberikan “stimulus” sehingga konten bisa disampaikan kepada sasaran lebih luas dan bisa diatur, dalam bentuk iklan di *platform* Facebook dan Instagram.
5. **Konsep Perumusan *Information Management Centre* (IMC).** Konsep pembuatan *dashboard* pusat data dan informasi yang terintegrasi terkait dengan pelaksanaan program-program Pusbindiklatren dan alumni beasiswa Pusbindiklatren sehingga data-data tersebut dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan.

6. **Penyusunan Peta Jalan Pusbindiklatren 2022–2025.** Dokumen peta jalan Pusbindiklatren ini disusun sebagai salah satu dokumen strategi Pusbindiklatren untuk menentukan cita-cita Pusbindiklatren pada kurun waktu empat tahun dengan melihat situasi dan kondisi saat ini dengan menggunakan analisis SWOT. Dokumen ini diharapkan dapat dijadikan acuan pimpinan dan seluruh staf Pusbindiklatren untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan dengan melaksanakan program/kegiatan yang dilakukan secara bertahap (fase).
7. **Penyusunan *Human Capital Development Planning* (HCDP) Pusbindiklatren.** Penyusunan dokumen HCDP bertujuan untuk memetakan rencana pengembangan kompetensi sumber daya manusia berdasarkan kebutuhan organisasi dan prioritas pengembangan ASN sesuai dengan tujuan organisasi.
8. **Penyusunan Petunjuk Teknis sebagai Turunan dari PermenPANRB No. 4 Tahun 2020.** Selaku instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana (JFP) Pusbindiklatren berkewajiban untuk segera menuntaskan petunjuk teknis (juknis), panduan operasional, dan melaksanakan edukasi serta advokasi kepada pemangku kepentingan atas implikasi dari perubahan-perubahan tersebut dalam pengelolaan Jabatan Fungsional Perencana. Pusbindiklatren telah menyusun lima juknis meliputi (a) juknis penilaian kinerja perencana; (b) juknis penyusunan formasi; (c) juknis pengangkatan, kenaikan pangkat/jabatan, pemberhentian dan pengangkatan kembali ke dalam JFP; (d) juknis standar kompetensi JFP; dan (e) juknis pengembangan kompetensi JFP.
9. **Perubahan dalam mekanisme Pemilihan Pelaksana Pelatihan.** Pusbindiklatren melakukan pemilihan pelaksana pelatihan dengan menggunakan evaluasi dan penilaian proposal dari calon pelaksana pelatihan. Penilaian dilakukan oleh tim penilai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pusbindiklatren.
10. **Konsep Program *On The Job Training* bagi ASN Perencana.** Program *On The Job Training* merupakan inovasi pelatihan nonklasikal. Beberapa konsep tipe atau bentuk *on the job training* meliputi regular, kolaboratif, dan penelitian kebijakan.
11. **Pelaksanaan Pelatihan secara *Hybrid*.** Beberapa jenis pelatihan Pusbindiklatren dilakukan dengan mengkombinasikan metode daring dan luring (*hybrid*). Hal ingin akan meningkatkan efektivitas pelatihan.
12. **Pelaksanaan Uji Kompetensi.** Dengan dikeluarkannya PermenPANRB No. 4 tahun 2020 dan Peraturan BKN No. 20 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan JFP bahwa pendidikan dan pelatihan tidak menjadi persyaratan menduduki jabatan fungsional. Meskipun demikian, uji kompetensi tetap merupakan salah satu syarat untuk menduduki jabatan fungsional. Uji kompetensi diperuntukkan bagi perencana yang akan menduduki jabatan setingkat lebih tinggi dan/atau perpindahan jabatan dari jabatan lain ke JFP. Uji kompetensi terdiri atas kompetensi teknis, manajerial, dan sosio-kultural.

3.2 REALISASI ANGGARAN PROGRAM PUSBINDIKLATREN

3.2.1 Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2021

Realisasi anggaran Pusbindiklatren pada tahun 2021 sebesar Rp141.408.054.392 (seratus empat puluh satu miliar empat ratus delapan juta lima puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) atau 94,07 persen dari total anggaran sebesar Rp150.318.935.000 (seratus lima puluh miliar tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Rincian realisasi anggaran (data per 31 Desember 2021) sebagaimana Tabel 3.15.

Tabel 3.15 Realisasi Anggaran 2021

Pembiayaan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Loan	PHRD IV	74.986.884.000	68.361.161.871	91,16%
	COREMAP-CTI	17.829.000.000	16.637.863.017	93,32%
Sub Total		92.815.884.000	84.999.024.888	91,58%
Rupiah Murni (RM)	Rupiah Murni	35.314.850.000	34.493.508.753	97,67%
	Rupiah Murni DM III dan DM IV (6272)	4.824.840.000	4.820.693.918	99,91%
	Rupiah Murni Lintas Bidang (6259)	1.468.236.000	1.468.236.000	100,00%
	Rupiah Murni Pendamping (RMP)	15.895.125.000	15.626.590.833	98,31%
Sub Total		57.503.051.000	56.409.029.504	98,10%
TOTAL		150.318.935.000	141.408.054.392	94,07%

Berdasarkan Tabel 3.15 dapat diketahui realisasi anggaran sebagai berikut.

- a. Realisasi anggaran PLN sebesar Rp84.999.024.888 (91,58 persen) dari total anggaran Rp92.815.884.000. Realisasi tersebut terdiri dari pinjaman *Professional Human Resources Development IV* (PHRD IV) dan Coremap-CTI.
- b. Realisasi RMP yang merupakan anggaran pendamping untuk program PHRD IV sebesar Rp15.626.590.833 (97,93 persen) dari anggaran sebesar Rp15.895.125.000. Penggunaan anggaran RMP adalah pembiayaan Pelatihan Bahasa, Pelatihan Teknis, Pelatihan Spesifik, dan Pelatihan Fungsional Perencana.
- c. Realisasi anggaran RM sebesar Rp40.782.438.671 (98,02 persen) dari anggaran sebesar Rp41.607.926.000. Anggaran tersebut dilaksanakan oleh empat Pokja dan lintas Pokja, dengan perincian sebagai berikut.
 - 1) Anggaran Pokja 0 sebesar Rp25.973.280.000 dengan realisasi sebesar Rp23.741.506.162 (91,41 persen). Anggaran ini digunakan untuk kegiatan:
 - a) FGD, rapat koordinasi dan konsiyering secara internal dan eksternal yang terkait dengan kegiatan administrasi keuangan, teknologi dan informatika, dan sesuai dengan pelaksanaan tugas yang mendukung tuis Pusbindiklatren;

- b) Melakukan perjalanan dinas terkait dengan penyelesaian administrasi keuangan/kontrak dan perjalanan studi banding untuk pembuatan IMC;
 - c) Kegiatan belanja sewa, percetakan dan perbaikan sarana dan prasarana kerja;
 - d) Pembayaran tenaga PPNPN dan Konsultan.
- 2) Anggaran Pokja 1 sebesar Rp1.965.464.000 dengan realisasi sebesar Rp1.923.638.569 (97,87 persen). Anggaran ini digunakan untuk kegiatan
- a) Pengembangan program dan kerja sama pendidikan dan pelatihan (diklat);
 - b) Kegiatan perencanaan dan penganggaran program pendidikan dan pelatihan (diklat) dan konsultan pengembangan SDM perencana pembangunan (manajemen talenta);
 - c) Fasilitasi penyusunan HCDP.
- 3) Anggaran Pokja 2 sebesar Rp114.955.215.000 dengan realisasi sebesar Rp108.390.836.693 (94,29 persen). Anggaran ini digunakan untuk kegiatan
- a) Rapat koordinasi, FGD dan konsiyering dengan internal dan *stakeholder* yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, termasuk rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan;
 - b) Kegiatan seleksi program beasiswa Pusbindiklatren;
 - c) Kegiatan *workshop* untuk calon karyasiswa afirmasi;
 - d) Perjalanan dinas dalam dan luar negeri;
 - e) Penyelenggaraan program pendidikan dalam dan luar negeri;
 - f) Penyelenggaraan program pelatihan dalam dan luar negeri.
- 4) Anggaran Pokja 3 sebesar Rp1.131.900.000 dengan realisasi sebesar Rp1.063.643.050 (93,97 persen). Anggaran ini digunakan untuk kegiatan
- a) Rapat koordinasi pembinaan JFP dengan *stakeholder*;
 - b) Seleksi jabatan fungsional perencana (tes materi dan uji kompetensi penyesuaian/*inpassing*);
 - c) Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perencana;
 - d) Memberikan Fasilitasi
 - Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Perencana penyusunan peraturan JFP,
 - Lembaga Sertifikasi Profesi Perencana Pembangunan (LSP Renbang),
 - Pemilihan Pelaksana Pelatihan Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2022,
 - Pembahasan Penilaian Angka Kredit (PAK) Perencana Tahun 2021,
 - Pembahasan Persiapan Harmonisasi Juknis Penilaian Kinerja Perencana Tahun 2021 dan Pembahasan Persiapan Harmonisasi Juknis Penilaian Kinerja Perencana Tahun 2021.
- 5) Anggaran Lintas untuk DM III sebesar Rp2.074.840.000 dengan realisasi sebesar Rp2.070.842.750 (99,81 Persen) dan Anggaran Lintas untuk DM IV sebesar Rp2.750.000.000 dengan realisasi sebesar Rp2.749.851.168 (99,99 Persen). Anggaran Lintas tersebut adalah anggaran Pusbindiklatren yang dikembalikan ke Biro Renortala dan dimanfaatkan oleh DM III dan DM IV.

- 6) Anggaran Lintas PPK sebesar Rp1.468.236.000 dengan realisasi sebesar Rp1.468.236.000 (100 Persen). Anggaran ini digunakan untuk Sewa Rumah Untuk Arsip dan Sewa Rumah Untuk Kesekretariatan PPK Program PPN X.

Walaupun secara persentase penyerapan anggaran terdapat kenaikan dibandingkan tahun 2020, namun beberapa hal menyebabkan belum maksimalnya penyerapan anggaran seperti (1) pelatihan luar negeri tidak memenuhi jumlah peserta yang direncanakan, *over estimate* untuk kegiatan pelatihan Coremap-CTI dan Kegiatan PHRD IV, kurs realisasi pembayaran Coremap-CTI dan PHRD IV lebih rendah, dan (2) tidak berangkatnya karyasiswa untuk studi di universitas luar negeri karena alasan pandemik. Tabel realisasi anggaran berdasarkan penanggung jawab disajikan dalam Table 3.16 di bawah ini.

Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Per Penanggung Jawab

Unit Kerja		Loan	RM	RMP	Total
POKJA 0	Anggaran (Rp)	13.846.637.000	12.126.643.000	0	25.973.280.000
	Realisasi (Rp)	11.812.855.488	11.928.650.674	0	23.741.506.162
	Persentase	85,31%	98,37%	0,00%	91,41%
POKJA 1	Anggaran (Rp)	0	1.965.464.000	0	1.965.464.000
	Realisasi (Rp)	0	1.923.138.569	0	1.923.138.569
	Persentase	0,00%	97,85%	0,00%	97,85%
POKJA 2	Anggaran (Rp)	78.969.247.000	20.090.843.000	15.895.125.000	114.955.215.000
	Realisasi (Rp)	73.186.169.400	19.578.076.460	15.626.590.833	108.390.836.693
	Persentase	92,68%	97,45%	98,31%	94,29%
POKJA 3	Anggaran (Rp)	0	1.131.900.000	0	1.131.900.000
	Realisasi (Rp)	0	1.063.643.050	0	1.063.643.050
	Persentase	0,00%	93,97%	0,00%	93,97%
Lintas DM III (6272)	Anggaran (Rp)	0	2.074.840.000	0	2.074.840.000
	Realisasi (Rp)	0	2.070.842.750	0	2.070.842.750
	Persentase	0,00%	99,81%	0,00%	99,81%
Lintas DM IV (6272)	Anggaran (Rp)	0	2.750.000.000	0	2.750.000.000
	Realisasi (Rp)	0	2.749.851.168	0	2.749.851.168
	Persentase	0,00%	99,99%	0,00%	99,99%
Lintas PPK (6259)	Anggaran (Rp)	0	1.468.236.000	0	1.468.236.000
	Realisasi (Rp)	0	1.468.236.000	0	1.468.236.000
	Persentase	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Total Anggaran Pusbindiklatren	Anggaran (Rp)	92.815.884.000	41.607.926.000	15.895.125.000	150.318.935.000
	Realisasi (Rp)	84.999.024.888	40.782.438.671	15.626.590.833	141.408.054.392
	Persentase	91,58%	98,02%	98,31%	94,07%

3.2.2 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2021

Perbandingan penyerapan anggaran pada tahun 2020 dan 2021 disajikan pada Tabel 3.17 di bawah ini. Realisasi anggaran pada tahun 2021 secara keseluruhan mengalami kenaikan sekitar 0,05 persen (dari 94,02% menjadi 94,07%). Pemanfaatan anggaran untuk pelatihan secara daring (Renstra, Teknis, Spesifik, Penjenjangan Jabatan Fungsional Perencana, dan Bahasa Inggris), dan melaksanakan pelatihan secara *offline/hybrid* baik pelatihan dalam negeri maupun pelatihan luar negeri.

Tabel 3.17 Perbandingan Penyerapan Anggaran Tahun 2020 dan 2021

2020			2021		
Alokasi (Rp)	Penyerapan (Rp)	Persentase	Alokasi (Rp)	Penyerapan (Rp)	Persentase
183.348.216.000	172.388.147.844	94,02%	150.318.935.000	141.408.054.392	94,07%



BAB IV. PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

1. Pada tahun 2021, Indikator Kinerja Pusbindiklatren dan capaiannya sebagai berikut: (1) jumlah Pejabat Fungsional Perencana yang memenuhi standar kompetensi dengan target 450 orang dan jumlah realisasi sebanyak 823 orang (182,9 persen); (2) jumlah mahasiswa yang lulus program pendidikan dengan target 250 orang dan realisasi 369 orang (147,6 persen); (3) jumlah peserta terlatih dengan target 675 orang dan realisasi 1.952 orang (289,2 persen); serta (4) tingkat kepuasan pelayanan penyelenggaraan diklat dengan target puas telah memenuhi kepuasan pelayanan. Seluruh indikator yang ditetapkan oleh Pusbindiklatren tersebut telah terpenuhi dan melampaui target yang telah ditentukan.
2. Realisasi anggaran pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp141.408.054.392 atau 94,07 persen dari alokasi sebesar Rp150.318.935.000. Walaupun penyerapan berada di kisaran 94,07 persen, akan tetapi pencapaian kinerja Pusbindiklatren telah mampu melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Pusbindiklatren telah menjalankan kegiatannya dengan efisien.
3. Pusbindiklatren dalam tahun 2021 telah banyak melakukan inovasi sebagai berikut.
 - a. Direktori Alumni Program Pendidikan
 - b. Survei Umpan Balik Kegiatan Klinik ASN Perencana
 - c. Ikhtisar Laporan Kinerja (LKj) Pusbindiklatren
 - d. Penerapan *Social Media Marketing* pada Media Sosial Resmi Pusbindiklatren Bappenas
 - e. *Information Management Centre* (IMC)
 - f. Penyusunan Peta Jalan Pusbindiklatren 2021–2025
 - g. Penyusunan *Human Capital Development Planning* (HCDP) Pusbindiklatren

- h. Penyusunan Petunjuk Teknis sebagai Turunan dari PermenPANRB No. 4 Tahun 2020
- i. Pemilihan Pelaksana Pelatihan
- j. Konsep Program *On The Job Training* bagi ASN Perencana
- k. Pelaksanaan Pelatihan secara *Hybrid*
- l. Pelaksanaan Uji Kompetensi.

4.2 REKOMENDASI 2021 UNTUK RENCANA AKSI 2022

Secara umum rekomendasi tahun 2021 akan diupayakan diimplemetasikan pada tahun 2022 sebagai berikut.

1. **Pokja 0 (Organisasi, Tata Laksana, Administrasi, dan Keuangan)**
 - a. Penyempurnaan aplikasi *dashboard* Sintesa, Sipena, dan Wifast.
 - b. Pengembangan sistem e-Perpustakaan.
 - c. Pembaharuan *website* dan profil Pusbindiklatren.
 - d. Penyempurnaan tata kelola kehumasan Pusbindiklatren.

2. **Pokja 1 (Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Institusi Perencanaan Pembangunan)**
 - a. Pelaksanaan *On The Job Training* bagi SDM perencana sebagai *pilot project* penerapan pelatihan nonklasikal.
 - b. Metode pelaksanaan pelatihan *hybrid* yaitu dengan sistem pembelajaran daring dan luring.
 - c. Pemetaan progres HCDDP instansi sasaran program Pusbindiklatren.

3. **Pokja 2 (Penyelenggaraan, Pengendalian, dan Pemantauan Pendidikan dan Pelatihan)**
 - a. Pelaksanaan program pendidikan dengan pendekatan *cost sharing* dengan kementerian/lembaga/instansi daerah untuk memaksimalkan anggaran khususnya yang berbasis rupiah murni.
 - b. Pelaksanaan program pelatihan yang lebih inklusif dengan memberikan peluang kepada para penyedia jasa pelatihan secara umum untuk dapat menjadi pelaksana pelatihan yang dibiayai Pusbindiklatren.
 - c. Penyelesaian administrasi *closing date* proyek Coremap-CTI untuk komponen pengembangan kapasitas berlangsung dengan baik dan akuntabel.
 - d. Memastikan pelaksanaan dampak dari program pelatihan baik bagi pengembangan kapasitas peserta pelatihan maupun pengembangan kinerja organisasi.

4. Pokja 3 (Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana)

- a. Pemanfaatan aplikasi Sikeren untuk penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Perencana oleh instansi perencanaan pembangunan di pusat maupun daerah.
- b. Penerbitan sertifikat bagi peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana saran dari Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian PANRB.
- c. Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana dilaksanakan setiap bulan pada mulai April s.d. November 2022.
- d. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana bekerja sama dengan universitas/prodi pelaksana Pelatihan Fungsional Perencana.





LAMPIRAN

LAMPIRAN 1:**JUMLAH JFP YANG MEMENUHI STANDAR KOMPETENSI****A. Gelombang I**

No.	Jenjang	Pelaksanaan	Periode	Peserta
1.	FP Pertama	Pusbindiklatren	19-20 Juni 2021	80
2.	FP Muda	Pusbindiklatren		179
3.	FP Madya	Pusbindiklatren		51
4.	FP Utama	Pusbindiklatren	5 April – 22 Juli 2021	9
JUMLAH PESERTA UKOM JFP GELOMBANG I				319

B. Gelombang II

No.	Jenjang	Pelaksanaan	Periode	Peserta
1.	FP Pertama	Pusbindiklatren	28-29 Agustus 2021	21
2.	FP Muda	Pusbindiklatren		92
3.	FP Madya	Pusbindiklatren		24
4.	FP Utama	Pusbindiklatren	-	0
JUMLAH PESERTA UKOM JFP GELOMBANG II				137

C. Gelombang III

No.	Jenjang	Pelaksanaan	Periode	Peserta
1.	FP Pertama	Pusbindiklatren	23, 24, 30 dan 31 Oktober 2021	101
2.	FP Muda	Pusbindiklatren		346
3.	FP Madya	Pusbindiklatren		58
4.	FP Utama	Pusbindiklatren	-	0
JUMLAH PESERTA UKOM JFP GELOMBANG III				505

D. Gelombang IV

No.	Jenjang	Pelaksanaan	Periode	Peserta
1.	FP Pertama	Pusbindiklatren	20-21 November 2021	49
2.	FP Muda	Pusbindiklatren		110
3.	FP Madya	Pusbindiklatren		41
4.	FP Utama	Pusbindiklatren	-	0
JUMLAH PESERTA UKOM JFP GELOMBANG IV				200

Pelatihan Fungsional Perencana Pusbindiklatren Bappenas 2021

No.	Jenjang	Prodi/Center	Periode	Realisasi
1	PFP Ahli Pertama	LPEM FEB UI	6 September 2021 - 22 Oktober 2021	20
2	PFP Ahli Pertama	RCCP FIA UB	23 Agustus 2021 - 11 Oktober 2021	20
3	PFP Ahli Pertama	MET FEB UNPAD	30 Agustus 2021 - 15 Oktober 2021	20
4	PFP Ahli Pertama	P2KP UNHAS	6 September 2021 - 22 Oktober 2021	20
5	PFP Ahli Pertama	SAPPK ITB	6 September 2021 - 22 Oktober 2021	20
6	PFP Ahli Pertama	MAP UGM	13 September 2021 - 30 Oktober 2021	20
7	PFP Ahli Pertama	PPS UNSRI	13 September 2021 - 30 Oktober 2021	20
8	PFP Ahli Pertama	FEB UNSYIAH	13 September 2021 - 30 Oktober 2021	20
9	PFP Ahli Pertama	P2KP UNHAS Angkatan II	4 Oktober 2021 - 19 November 2021	20
10	PFP Ahli Pertama	MET FEB UNPAD Angkatan II	25 Oktober 2021 - 10 Desember 2021	21
Jumlah Peserta Pelatihan Perencana Ahli Pertama				201

LAMPIRAN 2:**JUMLAH KARYASISWA YANG LULUS PENDIDIKAN**

NO	UNIVERSITAS	PROGRAM									JUMLAH
		S-2 DN	S-2 Afir-masi	S-2 LK	S-2 LK PR	S-2 SSMP	S-2 LN	S-2 Core-map	S-3 DN	S-3 LN	
1	Institut Pertanian Bogor	10									10
2	Institut Teknologi Bandung	21		5	7				1		34
3	Universitas Andalas	10									10
4	Universitas Brawijaya	26	6	10							42
5	Universitas Diponegoro	17									17
6	Universitas Gadjah Mada	61	5	29	1	1			2		99
7	Universitas Hasanuddin	15				9					24
8	Universitas Indonesia	36		25	2						63
9	Universitas Padjadjaran	20		15					1		36
10	Universitas Sriwijaya	15	7								22
11	Universitas Syiah Kuala	6									6
12	Luar Negeri						2	1		3	6
	TOTAL	237	18	84	10	10	2	1	4	3	369

Keterangan:

DN : Dalam Negeri

LK : *Linkage*LK PR : *Linkage Premium*SSMP: *Split-Site Master's Program*

LAMPIRAN 3:
JUMLAH PESERTA TERLATIH

No	Topik	Pelaksana Diklat	Tanggal	Peserta	Kelulusan	%
1	CITY PLANNING	MPWK ITB	20 September– 1 Oktober 2021	25	25	100%
			25 Oktober– 5 November	25	25	100%
		MPWK UGM	23 Agustus–3 September 2021	25	25	100%
			8–19 November 2021	25	25	100%
		MPWK UNDIP	6–17 September 2021	25	25	100%
			1–12 November 2021	24	24	100%
2	KELAYAKAN PROYEK	LEMTEK UI	4–15 Oktober 2021	24	24	100%
		LPEM UI	13–24 September 2021	24	24	100%
3	LOCAL ECONOMIC RESOURCES DEVELOPMENT (LERD)	MPWK UGM	20 September– 1 Oktober 2021	25	25	100%
		PPS UNSRI	15–26 November 2021	30	30	100%
4	MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)	LPEM UI	16–27 Agustus 2021	25	25	100%
			8–19 November 2021	24	24	100%
		MPWK UGM	18–29 Oktober 2021	23	23	100%
			15–26 November 2021	18	18	100%
		PPS UNSYIAH	2–13 Agustus 2021	21	21	100%

No	Topik	Pelaksana Diklat	Tanggal	Peserta	Kelulusan	%
		RCCP UB	30 Agustus–10 September 2021	25	25	100%
			1–12 November 2021	21	21	100%
			15–26 November 2021	21	21	100%
			22 Nopember–3 Desember	25	25	100%
5	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	FE Unand	30 Agustus–10 September 2021	25	25	100%
			8–19 Nopember	22	22	100%
		FEB USK	4–15 Oktober 2021	25	25	100%
			15–26 November 2021	18	18	100%
		LPEM UI	2–13 Agustus 2021	25	25	100%
			8–19 November 2021	21	18	86%
		MEP UGM	6–17 September 2021	25	25	100%
			1–12 November 2021	25	25	100%
		MPWK UGM	4–15 Oktober 2021	23	23	100%
			15–26 November 2021	17	15	88%
		MPWK ITB	15–26 November 2021	25	25	100%
			22 November–3 Desember 2021	25	25	100%
		UTM	15–26 November 2021	22	22	100%

No	Topik	Pelaksana Diklat	Tanggal	Peserta	Kelulusan	%
6	PERENCANAAN LINGKUNGAN	MIL UNDIP	4–15 Oktober 2021	26	26	100%
		MIL Unpad	6–17 September 2021	25	25	100%
7	PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA	MIL UGM	15–26 November 2021	19	18	95%
		MPWK UGM	15–26 November 2021	21	21	100%
		Untad	22 November–3 Desember 2021	25	24	96%
		PPS USK	4–15 Oktober 2021	22	22	100%
8	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH-RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (PPD-RPJMD)	MAP UGM	30 Agustus–10 September 2021	25	25	100%
		MPWK UGM	16–27 Agustus 2021	25	25	100%
		P2KP Unhas	4–15 Oktober 2021	25	25	100%
		PPS Unsri	30 Agustus–10 September 2021	25	25	100%
		Unipa	4–15 Oktober 2021	28	28	100%
		FEB USK	15–26 November 2021	25	25	100%
		LPEM UI	15–26 November 2021	24	24	100%
		RCCP UB	22 Nopember–3 Desember	21	21	100%
		Uncen	3–19 November 2021	24	24	100%
UTM	15–26 November 2021	22	22	100%		
9	<i>PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP)</i>	MPWK ITB	18–29 Oktober 2021	26	26	100%

No	Topik	Pelaksana Diklat	Tanggal	Peserta	Kelulusan	%
		MPWK UGM	6–17 September 2021	25	25	100%
		MPWK Undip	20 September–1 Oktober 2021	25	25	100%
10	RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	Pusbindiklatren	14–18 Juni 2021	21	21	100%
		Pusbindiklatren	2–6 Agustus 2021	28	28	100%
		Pusbindiklatren	8–12 November 2021	26	26	100%
11	BASIC ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES (BEAP)	PB Unpad	9–22 November 2021	45	45	100%
		PB UGM	16–27 Agustus 2021	23	23	100%
		PB Undana	8–20 November 2021	24	24	100%
		PB UI	8–20 November 2021	23	23	100%
		PB UB	8–20 November 2021	24	24	100%
		PB Unhas	8–23 November 2021	23	23	100%
		Inlingua	8–20 November 2021	23	23	100%
12	CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROGRAM-CORAL TRIANGLE INITIATIVE (COREMAP-CTI)	Pusbindiklatren	11–15 Oktober 2021	26	26	100%
		Pusbindiklatren	18–22 Oktober 2021	19	19	100%
		Pusbindiklatren	25–29 Oktober 2021	27	27	100%
		Pusbindiklatren	24–26 November 2021	58	58	100%

LAMPIRAN 4:**TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN****A. Pendidikan**

NO.	PERTANYAAN	RESPONDEN	%
1	Penyampaian informasi terkait ketentuan program pendidikan dari petugas pemantau		
	Petugas pemantau kurang memahami dan kurang responsif perihal ketentuan program pendidikan pusbindiklatren	3	0,97%
	Petugas pemantau memahami perihal ketentuan program pendidikan pusbindiklatren namun kurang responsive	17	5,48%
	Petugas pemantau kurang memahami perihal ketentuan program pendidikan pusbindiklatren tetapi responsif	2	0,65%
	Petugas pemantau memahami dan responsif perihal ketentuan program pendidikan pusbindiklatren	288	92,90%
		310	100%
2	Pelayanan informasi pendidikan yang dilakukan oleh staf pusbindiklatren		
	Staf Pusbindiklatren kurang memahami ketentuan program pendidikan pusbindiklatren dan kurang responsif dalam menanggapi pertanyaan peserta	1	0,32%
	Staf Pusbindiklatren memahami ketentuan program pendidikan pusbindiklatren namun kurang responsif dalam menanggapi pertanyaan peserta	26	8,39%
	Staf Pusbindiklatren kurang memahami ketentuan program pendidikan pusbindiklatren tetapi responsif dalam menanggapi pertanyaan peserta	4	1,29%
	Staf Pusbindiklatren memahami ketentuan program pendidikan pusbindiklatren dan responsif dalam menanggapi pertanyaan peserta	279	90,00%
		310	100%
3	Informasi pendidikan pusbindiklatren dan akses terhadapnya		
	Informasi pendidikan yang diselenggarakan oleh pusbindiklatren masih minim dan sering terkendala/sulit diakses	4	1,30%
	Informasi pendidikan yang diselenggarakan oleh pusbindiklatren masih minim namun mudah diakses	22	7,14%
	Informasi pendidikan yang diselenggarakan oleh pusbindiklatren cukup memadai namun sering terkendala/sulit diakses	23	7,47%
	Informasi pendidikan yang diselenggarakan oleh pusbindiklatren cukup memadai dan mudah diakses	259	84,09%
		308	100%
4	Kualitas pelayanan informasi staf Pusbindiklatren		
	Informasi yang disampaikan oleh staf Pusbindiklatren tidak akurat dan sulit dipahami	2	0,65%

NO.	PERTANYAAN	RESPONDEN	%
	Informasi yang disampaikan oleh staf Pusbindiklatren tidak akurat meskipun mudah dipahami	3	0,98%
	Informasi yang disampaikan oleh staf pusbindiklatren akurat meskipun cara penyampaiannya sulit dipahami	11	3,58%
	Informasi yang disampaikan oleh staf pusbindiklatren akurat dan mudah dipahami	291	94,79%
		307	100%
5	Penjelasan informasi terkait hak yang diperoleh karyawan selama menerima beasiswa Pusbindiklatren		
	Pusbindiklatren tidak menjelaskan dengan rinci hak dan kewajiban karyawan selama menempuh program pendidikan	7	10,45%
	Pusbindiklatren menjelaskan hak dan kewajiban karyawan selama menempuh program pendidikan, namun penjelasan yang diberikan kurang rinci	20	29,85%
	Pusbindiklatren menjelaskan hak dan kewajiban karyawan selama menempuh program pendidikan, secara rinci	34	50,75%
	Pusbindiklatren menjelaskan hak dan kewajiban karyawan selama menempuh program pendidikan, secara rinci serta bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait lainnya	6	8,96%
		67	100%
6	Pelayanan staf pusbindiklatren sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN		
	Karyawan pernah dijanjikan dapat lolos seleksi program pendidikan pusbindiklatren dengan imbalan	0	0%
	Karyawan pernah dijanjikan dapat lolos seleksi program pendidikan pusbindiklatren tanpa imbalan	0	0%
	Karyawan tidak pernah dijanjikan dapat lolos seleksi program pendidikan pusbindiklatren	18	5,88%
	Karyawan tidak pernah dijanjikan dapat lolos seleksi program pendidikan pusbindiklatren dan pihak pusbindiklatren telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas kkn dalam penyelenggaraan program pendidikan	288	94,12%
		306	100%
7	Pendaftaran pendidikan dilakukan berbasis web (online)		
	Website pendaftaran sulit diakses dan fitur-fiturnya rumit	0	0%
	Website pendaftaran sulit diakses meskipun fitur-fiturnya sederhana dan mudah digunakan	10	3,24%
	Website pendaftaran mudah diakses meskipun fitur-fiturnya rumit	21	6,80%
	Website pendaftaran mudah diakses dan fitur-fiturnya sederhana dan mudah digunakan	278	89,97%
		309	100%
8	Proses seleksi (transparansi)		
	Pusbindiklatren tidak transparan dalam menyampaikan kebijakan seleksi dan penempatan peserta pendidikan tidak memuaskan	2	0,65%
	Pusbindiklatren tidak transparan dalam menyampaikan kebijakan seleksi meskipun penempatan peserta pendidikan memuaskan	13	4,22%

NO.	PERTANYAAN	RESPONDEN	%
	Pusbindiklatren transparan dalam menyampaikan kebijakan seleksi meskipun penempatan peserta pendidikan tidak memuaskan	12	3,90%
	Pusbindiklatren transparan dalam menyampaikan kebijakan seleksi dan penempatan peserta pendidikan memuaskan	281	91,23%
		308	100%
9	Penempatan peserta pendidikan		
	Pelaksana pendidikan/program studi dan area studi yang diikuti tidak sesuai dengan prioritas yang dipilih peserta	0	0%
	Pelaksana pendidikan/program studi sesuai dengan prioritas yang dipilih peserta namun area studi yang diikuti tidak sesuai dengan prioritas yang dipilih peserta	3	0,98%
	Pelaksana pendidikan/program studi tidak sesuai dengan prioritas yang dipilih peserta namun area studi yang diikuti sesuai dengan prioritas yang dipilih peserta	10	3,26%
	Pelaksana pendidikan/program studi dan area studi yang diikuti sesuai dengan prioritas yang dipilih peserta	294	95,77%
		307	100%
10	Fitur sistem informasi diklat (Simdiklat) yang disediakan pusbindiklatren		
	Fitur dalam simdiklat tidak membantu pemenuhan kewajiban administratif karyawan	0	0%
	Fitur dalam simdiklat membantu kebutuhan pemenuhan kewajiban administratif karyawan; namun aplikasi simdiklat sering mengalami gangguan	13	4,21%
	Fitur dalam simdiklat membantu kebutuhan pemenuhan kewajiban administratif karyawan; namun perlu ditambah fitur-fiturnya	71	22,98%
	Fitur dalam simdiklat membantu kebutuhan pemenuhan kewajiban administratif karyawan	225	72,82%
		309	100%
11	Penyampaian proses persiapan perkuliahan dari staf administrasi		
	Staf administrasi prodi bersikap pasif terkait proses persiapan perkuliahan	3	0,97%
	Staf administrasi prodi secara aktif berkomunikasi dengan calon karyawan namun penyampaian informasi persiapan perkuliahan masih kurang efektif	24	7,77%
	Staf administrasi prodi secara aktif berkomunikasi dengan calon karyawan dan penyampaian informasi persiapan perkuliahan berjalan efektif	44	14,24%
	Staf administrasi prodi secara aktif berkomunikasi dengan calon karyawan dan penyampaian informasi persiapan perkuliahan berjalan efektif. Selain itu, staf administrasi juga menjawab dan menerima keluhan dan pertanyaan karyawan	238	77,02%
		309	100%

NO.	PERTANYAAN	RESPONDEN	%
12	Pelayanan non akademik dari staf administrasi untuk menunjang kelancaran perkuliahan		
	Staf administrasi prodi/jurusan/departemen kurang memberikan pelayanan yang menunjang kelancaran perkuliahan	5	1,62%
	Staf administrasi prodi/jurusan/departemen memberikan pelayanan yang tidak menunjang kelancaran perkuliahan	0	0%
	Staf administrasi prodi/jurusan/departemen memberikan layanan yang menunjang kelancaran perkuliahan	46	14,94%
	Staf administrasi prodi/jurusan/departemen memberikan layanan yang menunjang kelancaran perkuliahan dan bersedia untuk menjawab pertanyaan/keluhan mahasiswa	257	83,44%
		308	100%

B. Pelatihan

NO.	PERTANYAAN	RESPONDEN	%
1	Pelayanan informasi Pelatihan yang dilakukan oleh Staf Pusbindiklatren		
	Staf Pusbindiklatren kurang memahami ketentuan program pelatihan Pusbindiklatren dan kurang responsif dalam menanggapi pertanyaan peserta	8	0,93%
	Staf Pusbindiklatren memahami ketentuan program pelatihan Pusbindiklatren namun kurang responsif dalam menanggapi pertanyaan peserta	33	3,84%
	Staf Pusbindiklatren kurang memahami ketentuan program pelatihan Pusbindiklatren tetapi responsif dalam menanggapi pertanyaan peserta	10	1,16%
	Staf Pusbindiklatren memahami ketentuan program pelatihan Pusbindiklatren dan responsif dalam menanggapi pertanyaan peserta	809	94,07%
		860	100%
2	Informasi Pelatihan Pusbindiklatren dan Akses terhadapnya		
	Informasi Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren masih minim dan sering terkendala/sulit diakses	5	0,58%
	Informasi Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren masih minim namun mudah diakses	22	2,56%
	Informasi Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren cukup memadai namun sering terkendala/sulit diakses	76	8,84%
	Informasi Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren cukup memadai dan mudah diakses	755	87,79%
		858	100%

NO.	PERTANYAAN	RESPONDEN	%
3	Kualitas pelayanan informasi staf Pusbindiklatren		
	Informasi yang disampaikan oleh Staf Pusbindiklatren tidak akurat dan sulit dipahami	2	0,23%
	Informasi yang disampaikan oleh Staf Pusbindiklatren tidak akurat meskipun mudah dipahami	6	0,70%
	Informasi yang disampaikan oleh Staf Pusbindiklatren akurat meskipun cara penyampaiannya sulit dipahami	26	3,02%
	Informasi yang disampaikan oleh Staf Pusbindiklatren akurat dan mudah dipahami	826	96,05%
		860	100%
4	Pendaftaran pelatihan dilakukan berbasis web (online)		
	Website Pendaftaran sulit diakses dan fitur-fiturnya rumit	5	0,58%
	Website Pendaftaran sulit diakses meskipun fitur-fiturnya sederhana dan mudah digunakan	27	3,14%
	Website Pendaftaran mudah diakses meskipun fitur-fiturnya rumit	71	8,26%
	Website Pendaftaran mudah diakses dan fitur-fiturnya sederhana dan mudah digunakan	757	88,02%
		860	100%
5	Proses seleksi (Tranparansi)		
	Pusbindiklatren tidak transparan dalam menyampaikan kebijakan seleksi dan penempatan peserta pelatihan tidak memuaskan	2	0,23%
	Pusbindiklatren tidak transparan dalam menyampaikan kebijakan seleksi meskipun penempatan peserta pelatihan memuaskan	10	1,16%
	Pusbindiklatren transparan dalam menyampaikan kebijakan seleksi meskipun penempatan peserta pelatihan tidak memuaskan	29	3,37%
	Pusbindiklatren transparan dalam menyampaikan kebijakan seleksi dan penempatan peserta pelatihan memuaskan	818	95,12%
		859	100%
6	Penempatan peserta pelatihan		
	Pelaksana Pelatihan/Program Studi dan Topik Pelatihan yang diikuti tidak sesuai dengan prioritas yang dipilih peserta	3	0,35%
	Pelaksana Pelatihan/Program Studi sesuai dengan prioritas yang dipilih peserta namun Topik Pelatihan yang diikuti tidak sesuai dengan prioritas yang dipilih peserta	34	3,95%

NO.	PERTANYAAN	RESPONDEN	%
	Pelaksana Pelatihan/Program Studi tidak sesuai dengan prioritas yang dipilih peserta namun Topik Pelatihan yang diikuti sesuai dengan prioritas yang dipilih peserta	32	3,72%
	Pelaksana Pelatihan/Program Studi dan Topik Pelatihan yang diikuti sesuai dengan prioritas yang dipilih peserta	791	91,98%
		860	100%
	Penggantian Paket Data dan Komunikasi		
	Penggantian paket data dan komunikasi tidak sesuai dengan kebutuhan dan penggantinya terlambat	67	7,79%
7	Penggantian paket data dan komunikasi tidak sesuai dengan kebutuhan namun penggantinya tepat waktu	81	9,42%
	Penggantian paket data dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan meskipun penggantinya terlambat	154	17,91%
	Penggantian paket data dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan dan penggantinya tepat waktu	459	53,37%
		761	100%
	Kualitas perangkat pendukung pelatihan		
	Terdapat perlengkapan standar untuk kegiatan pelatihan tetapi sering terkendala dalam pengoperasian;	41	4,77%
8	Terdapat perlengkapan mutakhir untuk kegiatan pelatihan tetapi sering terkendala dalam pengoperasian;	38	4,42%
	Terdapat perlengkapan standar untuk kegiatan pelatihan dan beroperasi dengan baik;	338	39,30%
	Terdapat perlengkapan mutakhir untuk kegiatan pelatihan dan beroperasi dengan baik	442	51,40%
		859	100%
	Kualitas pelayanan staf pelaksana pelatihan/program studi		
	Staf pelaksana pelatihan/program studi bersikap pasif terkait proses persiapan pelatihan;	9	1,05%
9	Staf pelaksana pelatihan/program studi secara aktif berkomunikasi dengan calon peserta namun penyampaian informasi persiapan pelatihan masih kurang efektif;	33	3,84%
	Staf pelaksana pelatihan/program studi secara aktif berkomunikasi dengan calon peserta dan penyampaian informasi persiapan pelatihan berjalan efektif;	114	13,26%

NO.	PERTANYAAN	RESPON-DEN	%
	Staf pelaksana pelatihan/program studi secara aktif berkomunikasi dengan calon peserta dan penyampaian informasi persiapan pelatihan berjalan efektif. Selain itu, staf pelaksana pelatihan/program studi juga menjawab dan menerima keluhan dan pertanyaan peserta	704	81,86%
		860	100%
	Kesesuaian jadwal dengan pelaksanaan pelatihan		
10	Jadwal pelaksanaan berubah-ubah dan pihak pelaksana pelatihan/program studi tidak memberikan alasan adanya perubahan tersebut	9	1,05%
	Jadwal pelaksanaan berubah-ubah dan pihak pelaksana pelatihan/program studi memberikan alasan yang tidak masuk akal terhadap adanya perubahan tersebut	4	0,47%
	Jadwal pelaksanaan berubah-ubah dan pihak pelaksana pelatihan/program studi memberikan alasan yang masuk akal terhadap adanya perubahan tersebut	111	12,91%
	Jadwal pelaksanaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak pelaksana pelatihan/program studi	736	85,58%
		860	100%
	Keselarasan bahan ajar dalam Sipena dengan yang disampaikan pada saat pelatihan		
11	Bahan ajar tidak diunggah dalam Sipena melainkan dibagikan melalui media lain	4	0,47%
	Hanya sebagian kecil bahan ajar diunggah dalam Sipena dan umumnya materi yang diajarkan tidak sesuai dengan bahan ajar tersebut	5	0,58%
	Sebagian besar bahan ajar diunggah dalam Sipena dan umumnya materi yang diajarkan sesuai dengan bahan ajar tersebut	178	20,70%
	Seluruh bahan ajar diunggah dalam Sipena dan materi yang diajarkan sesuai dengan bahan ajar tersebut	673	78,26%
		860	100%
	Aplikasi Sipena membantu dalam pelaksanaan pelatihan		
12	Fitur dalam Sipena tidak membantu pemenuhan kewajiban administratif peserta dan aplikasi Sipena sering mengalami gangguan	1	0,12%
	Fitur dalam Sipena tidak membantu pemenuhan kewajiban administratif peserta meskipun aplikasi Sipena mudah diakses	6	0,70%
	Fitur dalam Sipena membantu pemenuhan kewajiban administratif peserta meskipun aplikasi Sipena sering mengalami gangguan	76	8,84%

NO.	PERTANYAAN	RESPONDEN	%
	Fitur dalam Sipena membantu pemenuhan kewajiban administratif peserta dan aplikasi Sipena mudah diakses	777	90,35%
		860	100%
	Sistematika kurikulum pelatihan dan beban jam pelajaran untuk masing-masing materi		
13	Kurikulum tidak sistematis dan beban jam pelajaran untuk masing-masing materi tidak proporsional.	8	0,93%
	Kurikulum sistematis namun beban jam pelajaran untuk masing-masing materi tidak proporsional	143	16,63%
	Kurikulum tidak sistematis namun beban jam pelajaran untuk masing-masing materi proporsional	25	2,91%
	Kurikulum sistematis serta beban jam pelajaran untuk masing-masing materi proporsional	680	79,07%
		856	100%
	Penyajian materi sudah runtut dan mudah dipahami		
14	Penyampaian materi oleh pengajar/fasilitator tidak runtut serta tidak mudah dipahami	4	0,47%
	Penyampaian materi oleh pengajar/fasilitator runtut namun tidak mudah dipahami	45	5,23%
	Penyampaian materi oleh pengajar/fasilitator tidak runtut namun mudah dipahami	53	6,16%
	Penyampaian materi oleh pengajar/fasilitator runtut serta mudah dipahami	758	88,14%
		860	100%
	Proporsi Materi Pelatihan		
15	Materi pelatihan seluruhnya bersifat teoretis/konseptual	2	0,23%
	Materi yang diberikan lebih banyak teoretis/konseptual	96	11,16%
	Materi yang diberikan lebih banyak latihan/praktek	39	4,53%
	Materi berupa teoretis dan praktek cukup proporsional	723	84,07%
		860	100%
	Relevansi materi pelatihan untuk diterapkan di instansi asal peserta		
16	Sebagian besar materi pelatihan yang diajarkan tidak relevan dengan pekerjaan di unit kerja.	11	1,28%
	Sebagian besar materi pelatihan relevan dengan pekerjaan namun sulit diterapkan di unit kerja.	51	5,93%
	Hanya sebagian kecil materi pelatihan yang relevan dengan pekerjaan dan dapat diterapkan di unit kerja.	80	9,30%

NO.	PERTANYAAN	RESPONDEN	%
	Materi pelatihan relevan dengan pekerjaan dan dapat diterapkan untuk menyelesaikan pekerjaan di unit kerja	718	83,49%
		860	100%
17	Materi yang disampaikan sesuai dengan tujuan pelatihan		
	Pelatihan ini hanya meningkatkan pengetahuan peserta	8	0,93%
	Pelatihan sebatas memberikan pemahaman kepada peserta	29	3,37%
	Pelatihan ini hanya meningkatkan keterampilan peserta	14	1,63%
	Pelatihan telah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta	809	94,07%
		860	100%



Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas
Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta 10320
Telepon: (021) 319 28280, 319 28285, 319 28279
Faksimile: (021) 319 28281
Pos-el: pusbindiklatren@bappenas.go.id
Situs Web: pusbindiklatren.bappenas.go.id

  Pusbindiklatren Bappenas   @pusbindiklatren